



RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANITIA KERJA TENTANG
PENINGKATAN LITERASI TENAGA PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR-RI

- Tahun Sidang** : 2022 - 2023
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
Waktu : 10.44 WIB s.d. 14.23 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.
Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/F-PKS
: Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional;
2. Perkembangan Penyusunan Peta Jalan Literasi Nasional;
3. Kebijakan Anggaran Literasi dan Peningkatan ASN Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan).
Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
2. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M.
3. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Andreas Hugo Pareira
2. Dra. Adriana Charlotte Dodokambey, M.Si.
3. Rano Karno, S.IP.
4. H. Arwan M.Aras T., S.Kom.

F-P.GOLKAR :

1. Ferdiansyah, S.E., M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnama Sidi
3. Robert Jopyy Kardinal, SAB

F-P.GERINDRA :

1. Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
2. Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Si.

F-P.NASDEM :

1. Moh. Haerul Amri, SP.

F-PKB :

1. Drs. H. Bisri Romly, M.M.

F-P.DEMOKRAT :

-

F-PKS :

1. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med.
2. H. Mustafa Kamal, S.S.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. Badan Standar Kurikulum & Asesmen Pendidikan (Kemendikbudristek RI)
2. Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa (Kemendikbudristek RI)
3. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (Kemendagri RI)
4. Dirjen Percepatan & Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes Pdt RI)
5. Dirjen Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tetinggal & Transmigrasi (Kemendes Pdt RI)
6. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Dan Prestasi Olahraga (Kemenko Pmk RI)
7. Dirjen Aplikasi Infomatika (Kominfo RI)
8. Deputi Bidang Sdm Aparatur (Kemenpan RB RI)
9. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (BKN RI)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT / F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):

Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, siapa ini Pak Rafdinal, Kemudian Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Pak siapa ini, Pak Wahyu,

PERWAKILAN DITJEN APLIKASI INFORMASI KOMINFO:

Mohon izin, mewakili Pak Dirjen, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

Kemudian, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PanRB, ini ada dua ya, Pak Subagja, betul
Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Kementerian Kebudayaan dan Prestasi olahraga, Kemenku PMK.

**PERWAKILAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL
KEMENTERIAN PMK:**

Assalamualaikum.

Saya mewakili.

KETUA RAPAT:

Bu Moli ya.

**PERWAKILAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL
KEMENTERIAN PMK:**

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya, Bu Moli Prabawati.

Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Pak Ahmad Saoki,

Mana, oh iya, Pak Ahmad Saoki.

Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati.

}

Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Dengar Pendapat.

5 Fraksi sudah ada di ruangan dan satu masih dalam perjalanan. Oleh karenanya, 28 apa menurut Pasal 281 ayat (1) peraturan DPR RI berarti telah terpenuhi, kuorum dengan mengucap, "*bismillahirrahmanirrahim*" atas izin Pimpinan, Anggota Komisi X saya nyatakan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dinyatakan terbuka, eh dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.44 WIB)

(KETUK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Agenda RDP hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Dengan agenda:

1. Evaluasi pelaksanaan gerakan literasi nasional,
2. Perkembangan penyusunan peta jalan literasi nasional,
3. Kebijakan anggaran literasi, dan
4. Pengangkatan ASN tenaga perpustakaan atau pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Apakah disetujui Bapak-Ibu? Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Sebelumnya, saya membacakan sedikit pengantar untuk RDP hari ini. Tentu, RDP hari ini untuk sekian kalinya panja melaksanakan Undang-Undang MD3 Pasal 98, yakni pengawasan dalam ruang lingkup tugas Komisi.

Nah oleh karenanya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik, karena ini hampir akhir dari panja ini meskipun masih banyak ternyata yang harus diungkap dari peningkatan literasi, karena menyangkut tentang kementerian dan lembaga yang tidak hanya satu.

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Literasi merupakan pengetahuan dan kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang, sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat perkembangan zaman.

Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, dan menyatakan pendapat dan hubungan sebab akibat. Menurut WIF World Economic Forum 2018, eh 2015 cakupan beban literasi meliputi sains,

digital, finansial, budaya, kewarganegaraan, budaya baca dan tulis, numerasi, dan sains.

Keterampilan ini mempunyai empat ikatan yaitu, kemampuan tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas, serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan penulis buku, serta menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Ada banyak survei ataupun penilaian yang hasilnya menempatkan Indonesia di posisi rendah, diantaranya menurut survei PISA 2018 yang memotret kemampuan membaca, kemampuan membaca pelajar Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Survei itu menunjukkan Indonesia pada urutan 74 atau peringkat ke-6 dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara skor negara yang di survei oleh OECD 487.

Pada tahun 2019, Kemendikbudristek menurut informasi yang masuk ke Komisi X ini, menyusun indeks aktiva, aktivitas literasi membaca atau ahli baca dan skor masyarakat Indonesia 37,32 pada rentang 0-10. Indeks ini terbentuk dari 4 dimensi yakni; kecakapan, alternatif, budaya, dan akses. Kedua dimensi terakhir masih tergolong rendah yakni masing-masing 28,5 dan 23,09 yaitu, budaya dan akses berarti.

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Terkait literasi ini, yang dinilai rendah tentu masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa, karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih mutakhir diperoleh melalui kegiatan membaca.

Literasi yang rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas negara, produktivitas yang rendah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita yakni, tingkat pendapatan semua orang di sebuah negara jika terdistribusi secara merata. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan pengangguran, kesenjangan.

Komisi X bersama dengan pemerintah telah bersama-sama mengesahkan Undang-Undang 3 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional yang mengatur lima hal yaitu; jenis buku, hak dan kewajiban masyarakat, pelaku perbukuan berwenang, dan tanggung jawab pemerintah dan sistem perbukuan dan pengawasan. Undang-undang ini diharapkan membentuk ekosistem perbukuan yang sehat dengan semangat 3M, Mutu, Murah, Merata. Tapi pada kenyataannya, pemenuhan ketersediaan bahan bacaan juga menjadi hal yang mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan perhatian.

Perpusnas RI memaparkan bahwa satu buku ditunggu 90 penduduk. Rasio ini perlu diperbaiki agar semakin banyak bahan bacaan yang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui

bahwa toko buku legendaris misalnya, Gunung Agung sebagai penyedia buku di masyarakat mengalami kerugian dan bahkan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi di beberapa tempat.

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Mengingat pentingnya kebijakan peningkatan literasi yang mewujudkan SDM unggul di Indonesia, maka perlu didorong dengan kewajiban peningkatan anggaran khususnya di bidang perpustakaan, yang sampai hari ini sebut saja Perpustakaan RI *nggak* pernah ada sampai 1 triliun, mungkin 600-700 miliar saja. Padahal tugas dan tanggung jawab Perpustakaan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 43 2007 tentang Perpustakaan cukup besar, termasuk Kemendikbudristek juga memiliki kebijakan dan program literasi ini.

Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2022 telah merealisasikan program literasi dengan distribusikan 16.870.247 eksemplar buku ke-64.696 satuan pendidikan di daerah 3T dan non 3T. Program literasi yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa menargetkan 106.330 orang dengan anggaran 210,54 miliar, tahun 2023 menargetkan 109.449 orang dengan anggaran 123,52 miliar.

Pertanyaannya apakah jumlah keseluruhan anggaran literasi yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga ini memiliki fungsi dan program yang berarti buat literasi ini, peningkatan literasi? Bagaimana perkembangan peta jalan literasi di Indonesia? Bagaimana kolaborasi atau koordinasi dan sinergitas kebijakan literasi ini di Indonesia dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang memiliki fungsi dan program literasi ini?

Oleh karenanya, sebetulnya kami menyayangkan kalau ada beberapa kementerian/lembaga yang tidak diperbolehkan untuk hadir di sini. Karena sulit kalau tidak ke satu kementerian dan saya kementerian lain kemudian tidak boleh hadir di sini. Literasi ini yang paling tidak ada 4 atau 5 ini bahkan kita mengundang sepuluh kementerian/lembaga untuk hadir, yang terlihat di catatan Komisi X ini ada program literasi ini.

Pasal 4 Undang-Undang 4 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, status, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan tersebut tercapai, perpustakaan setidaknya memiliki informasi koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan yang profesional dan kompeten. Ruang untuk aktivitas publik dan peralatan atau alat-alat yang dapat mendorong terjadinya inovasi atau terciptanya produk jasa. Perpustakaan dan tenaga perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan literasi.

Menurut data oleh yang disampaikan Perpustakaan RI, 4 April 2023. Rasio ketersediaan tenaga perpustakaan Indonesia adalah satu pustakawan melayani 17.978 penduduk. Perpustakaan RI menyebutkan juga bahwa 4.643 pustakawan ASN yang tersebar tersebar di berbagai perpustakaan di Indonesia, sementara jumlah kebutuhan pustakawan adalah 493.031 pustakawan. Jadi baru 4.643, sementara kebutuhannya 493.000.

Adapun jumlah tenaga teknis perpustakaan ada 3.641 orang, sementara jumlah idealnya 51.000. Jadi baru 3.000, mustinya idealnya 51.000. *Nah*, kurangnya jumlah tenaga perpustakaan menyebabkan jumlah masyarakat yang dapat menerima manfaat dari keberadaan perpustakaan menjadi terbatas. Perpustakaan pun mengalami kendala dalam wujudkan pelayanan prima dan memuaskan para pemustaka. Pemenuhan tenaga perpustakaan menjadi hal yang penting dalam upaya peningkatan minat baca dan literasi, menjadikan membaca sebagai sebuah budaya.

Oleh karena itu, RDP hari ini ingin mengetahui mengenai evaluasi pelaksanaan gerakan literasi nasional seperti apa hasilnya, bagaimana perkembangan penyusunan peta setelah literasi nasional, bagaimana kebijakan anggaran literasi dan pengangkatan ASN, tenaga perpustakaan atau pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan.

Ini mungkin sebagai pengantar yang bisa saya bacakan. Ada beberapa kementerian/lembaga yang belum hadir, nanti mungkin kesepakatan dari Pimpinan akan kita undang lagi dan mungkin nanti akan kita komunikasikan dengan Pimpinan DPR, supaya mereka memang harus hadir. Kalau tidak memang kita nggak bisa mengurai ini literasi. Kan kita dinilai terus-terusan rendah oleh lembaga lain. Sungguh pun kita tidak mesti harus didikte oleh lembaga-lembaga itu, tapi juga itu juga itu harus punya komitmen untuk membuat standar-standar yang kita buat. Kita tidak mau dinilai orang lain, tapi kita tidak bisa menilai diri sendiri juga, karena kita *nggak* punya standar. Oleh karenanya, mungkin nanti sesuai dengan kesepakatan di Pimpinan Komisi X, kita akan mengundang lagi yang belum hadir.

Demikian barangkali dan untuk memulai paparan satu-satu, karena sekarang ada berapa 9. 9 dari 10 yang kita undang, maka kita sepakati dulu sampai jam berapa Bapak-Ibu?

Jam 1 ya, jam 13. Ini sekarang jam 11. Kita akhiri nanti jam 13.

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Selanjutnya, mungkin tanpa ada gradasi atau apaan mengurangi rasa hormat saya, sesuai dengan tulisan saja di sini. Mungkin, dipersilakan kepada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Kemendikbudristek, Pak Anindito, Aditomo. Mas Nino, silakan.

**KEPALA BADAN STANDAR KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENDIKBUDRISTEK RI:**

Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, terima kasih, Pak Fikri.

Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Salam sehat,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X yang menjadi Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan,
Para Pimpinan berbagai kementerian dari Kemendikbudristek,
Kemenko PMK,
Kementerian Desa,
Kemendagri,
Kemen PanRB,

Mohon maaf, ini daftarnya mungkin tidak *up to date*.

Dari Kominfo juga dan,
Bapak-Ibu yang lain.

Izin memulai paparan dari Kemendikbudristek, Pak Pimpinan.

Ada empat hal yang sebenarnya sudah pernah kita sampaikan juga dalam berbagai Raker dan RDP sebelumnya, cuman sekarang izinkan saya untuk merangkai dalam satu narasi. Bagaimana Merdeka Belajar kebijakan sekarang ini sebenarnya sangat mendukung penguatan literasi, bahkan literasi itu menjadi jantung dari Merdeka Belajar sesungguhnya.

Nanti Pak Amin akan melanjutkan dengan program yang dikawal Badan Bahasa dan juga kajian akademik, peta jalan literasi yang lebih luas. Saya akan ... (suara tidak terdengar 16.30).

Pertama, posisi literasi di dalam Merdeka Belajar secara keseluruhan, kemudian bagaimana kita menguatkan kita program yang dikawal oleh BSKAP. Jadi yang pertama, asesmen nasional generator pendidikan, kemudian kurikulum merdeka dan kemudian kebijakan dan program di pusat perbukuan BSKAP.

Boleh dilanjut ke halaman 5. Tujuan Merdeka Belajar itu kalau mau kita rangkumkan, sebenarnya salah satu yang utama adalah menguatkan literasi murid, karena kita percaya bahwa literasi murid merupakan fondasi dari kemampuan untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi, kalau seseorang tidak bisa memahami apa yang dibaca, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pelajar sepanjang hayat? Karena belajar menyerap informasi, mensintesis informasi fondasinya adalah kemampuan untuk memahami bacaan dan di Merdeka Belajar kita memasukkan 2 dari sekian banyak aspek literasi sebagai standar kompetensi lulusan.

Yang pertama tadi literasi membaca, dan yang kedua literasi matematika, karena matematika dasar itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Jadi, dua literasi inilah yang kita masukkan sebagai tujuan pembelajaran di dalam Kemendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Standar

Kompetensi Lulusan dan semua program prioritas Merdeka Belajar di Kemdikbud Ristek, itu sebenarnya sasarannya adalah untuk penguatan dua literasi ini.

Definisinya nanti bisa dibaca sendiri, ini saya cuplikan hanya yang untuk SMA, tapi kita punya definisi yang bergradasi, mulai dari paud sampai dengan SMA di Permendikbud Ristek itu, tapi ujungnya ini yang mau kita kembangkan ya lulusan SMA itu harus mampu dan gemar. Jadi bukan hanya bisa, tetapi senang berliterasi dan berliterasi itu bukan hanya membaca, kalau di tingkat SMA sudah termasuk juga mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi yang kompleks. Jadi, kesimpulannya sudah kompleks dari multiple sumber, sumber yang beragam, tapi juga bukan hanya menyerap ya, produksinya juga iya, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta kemampuan menulisnya secara ekspositori maupun secara naratif dengan berbagai sudut pandang.

Kalau untuk numerasi atau literasi matematika ini bukan matematika kalkulus, bukan trigonometri yang diperlukan untuk bidang-bidang spesifik, tapi kemampuan bernalar dengan matematika dasar sebenarnya. Jadi matematika kalau kontennya itu konten SMP, tapi apakah dia bisa menggunakan itu untuk bernalar dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita masukkan sebagai definisi dari numerasi atau literasi matematika.

Nah di halaman berikutnya ini ada beberapa ada 6 program yang kita sudah luncurkan dan rancang sekarang dalam proses implementasi untuk mendukung pembuatan dua literasi tadi.

Yang pertama adalah yang terkait dengan bagaimana kita menilai kinerja pendidikan kita di setiap level, mulai dari satuan pendidikan, pemda sampai secara nasional. Kita menilainya berdasarkan asesmen nasional yang mengukur dua literasi utama tadi, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi.

Hasil pengukuran asesmen nasional itu kita tampilkan melalui *platform* rapor pendidikan yang tadi pagi baru kita luncurkan juga versi barunya untuk pemda, sehingga semua satuan pendidikan dan semua pemda itu bisa mengakses berapa persen murid dia yang punya kemampuan membaca, literasi membaca tingkat minimum, berapa persen yang memiliki kemampuan numerasi tingkat minimum di setiap daerah dan di setiap sekolahnya dan apakah persentase tersebut meningkat dari tahun ke tahun? Jadi bisa untuk memonitor, memantau perkembangan, dan juga memetakan antar sekolah, antar daerah, antar kelompok sosial ekonomi. Jadi kesenjangannya juga bisa ter pantau di sini, dan itu kita integrasikan ke dalam SPM pendidikan.

Jadi, mulai tahun ini bagaimana Kemendagri menilai kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan, SPM pendidikan ini sudah mencerminkan hasil belajar berupa literasi membaca dan numerasi tadi. Jadi, sudah sejalan dengan ...(suara tidak terdengar 21.49).

Kebijakan yang kedua adalah pembelajarannya. Jadi, Kurikulum Merdeka dan *platform* Merdeka Mengajar. Dalam kurikulum merdeka, kita mengurangi *content* akademik, sehingga guru bisa lebih leluasa di dalam memetakan kemampuan peserta didik terlebih dahulu dan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran untuk diferensiasi ini sangat *crucial*, sangat penting kalau kita bertujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi.

Berbagai data yang kita miliki menunjukkan bahwa murid di kelas yang sama itu kemampuan membacanya bisa sangat berbeda-beda. Sama-sama kelas 4, tapi ada yang kemampuan membacanya sudah kelas 6 bahkan SMP, tapi ada juga yang masih kelas 1, kelas 2. Kalau mereka diajar diajari dengan cara yang sama, tentu tidak efektif. Karena itu, guru perlu punya waktu dan keleluasaan untuk menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, terutama untuk literasi dan numerasi dan itulah yang lebih dimungkinkan dengan Kurikulum Merdeka dan berbagai perangkat-perangkat ajar, termasuk asesmen kelas yang kita sediakan melalui *platform* Merdeka Mengajar.

Kemudian kelompok program dan kebijakan ketiga terkait dengan pembukuan, ini penyediaan buku teks maupun buku paket bacaan yang memantik kegemaran membaca, kecintaan akan bacaan.

Nomor 4, 5, 6 tidak menjadi fokus kali ini, tapi saya sampaikan secara sepintas saja. Kita juga melakukan pendampingan bagi pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data, menggunakan data-data asesmen nasional di *platform* rapor pendidikan itu. Jadi, pemda kita bantu secara teknis untuk bisa melakukan prioritas dan penganggaran yang fokusnya pada peningkatan literasi dan numerasi.

Kemudian terkait dengan kompetensi gurunya, pendidikan penggerak sebagai program calon kepala sekolah, pendidikan kepala sekolah itu juga berfokus pada kecakapan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dan itu membuat juga pembelajaran literasi, pembelajaran terdiferensiasi lagi juga.

Demikian juga dengan kurikulum PPG yang sedang dalam transformasi untuk lebih mengendap, mengedepankan pembelajaran terhadap diferensiasi.

Kemudian terakhir ada program-program sekolah penggerak, SMK PK, dan Komunitas Belajar Guru. Ini untuk peningkatan gurunya kecakapan guru di setiap satuan pendidikan yang sama juga fokusnya, salah satunya adalah pada pembelajaran terdiferensiasi untuk peningkatan literasi.

Kalau boleh ke halaman 8, ini pendalaman tiga kebijakan yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama tentang *assessment* nasional. Kita sudah melakukan dua kali, 2021 dan 2022 dan indikator utama yang kita ukur adalah kemampuan literasi, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi tadi. Jadi, sekarang kita sudah punya peta literasi secara nasional di tingkat satuan pendidikan bahkan. Jadi sebenarnya, ini jauh lebih komprehensif daripada PISA, kalau PISA itu hanya potret nasional saja, kalau *assessment* nasional itu memotret di tingkat satuan pendidikan yang kemudian diagregasi

di tingkat Pemda dan diagregasi di tingkat nasional sebagai indikator kinerja Pemda, dan Kemendibud Ristek, dan Kemenag.

Dan seperti saya sampaikan tadi *value* dari AN ini adalah pemetaan kesenjangan juga. Jadi, kita ingin agar pemda dan pemerintah pusat itu melakukan intervensi terutama pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, sehingga nilai rata-rata pasti akan naik, tapi naiknya itu karena yang paling bawah yang diangkat. Jadi, jauh lebih efektif dan memang ya ini keadilan bukan pemerataan gitu ya, keadilan dengan cara memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.

Jadi ya harapannya dalam beberapa tahun ke depan yang merah-merah di peta ini, itu pelan-pelan akan menjadi *orange* dan semoga semuanya akan menjadi hijau.

Di halaman berikutnya, ini menunjukkan. Iya, mohon maaf-mohon maaf. Nanti kita pikirkan pewarnaan yang lebih netral. Dari hitam menjadi putih gitu mungkin ya.

Baik, baik terima kasih masukannya, Bapak-Ibu.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Hitam juga ada, Pak hitam juga ada.

KEPALA BADAN STANDAR KURIKULUM DAN ASESSMEN PENDIDIKAN KEMENDIKBUDRISTEK RI:

Hitam ada juga. Baik, terima kasih nanti kita pikirkan.

Hasil *assessment* nasional tadi itu, nanti kita kepada sekolah dan dinas pendidikan melalui *platform* digital yang namanya *platform* rapor pendidikan. Jadi, sekarang Dinas Pendidikan, Pemda itu cukup *login* dan di satu tempat mereka akan bisa melihat semua indikator prioritas kinerja pendidikan mereka, termasuk dua indikator prioritas literasi dan numerasi, hasil belajar murid mereka.

Di halaman berikutnya, ini *platform* rapor pendidikan juga memuat indeks SPM yang seperti saya sampaikan tadi, itu salah satu komponen utama untuk menghitung SPM sekarang adalah literasi, numerasi murid. Jadi, kalau muridnya banyak yang tidak bisa baca dan tidak bisa menerapkan matematika dasar, itu SPM-nya daerah tidak akan bisa meningkat. Cara paling strategis bagi pemda untuk meningkatkan indeks SPM adalah dengan berfokus pada literasi sekarang ini.

Di halaman 12, ini masuk pada kurikulum dan pembelajaran. Ini sudah sering kami sampaikan di berbagai kesempatan dan termasuk program kemitraan, sosialisasi dengan Bapak-Ibu semuanya. Kurikulum Merdeka itu mendorong pengembangan literasi sebagai kompetensi dasar, karena kita mengurangi materi akademik, materinya kita fokuskan pada yang esensial,

sehingga pembelajaran bisa lebih mendalam dan guru bisa melakukan diferensiasi pembelajaran.

Kemudian yang kedua pembelajaran berbasis *project* diberi waktu khusus 20-30% dari jam pelajaran untuk pengembangan karakter dan kompetensi termasuk literasi dan ada fleksibilitas untuk melakukan *teach at the right level*, pembelajaran terdiferensiasi tadi di dalam Kurikulum Merdeka.

Ini kita tidak hanya berteori ya bahwa kurikulum seperti ini itu bisa meningkatkan literasi, kita sudah melakukan kajian dan ada data empiris yang sangat menggembirakan di halaman berikutnya. Ketika kita menawarkan kurikulum yang lebih terfokus di tahun 2021-2022. Jadi, ini versi awal kita menerapkan prinsip pengurangan materi akademik sebagai opsi ketika itu, kita sebutnya Kurikulum Darurat.

Setahun setelah itu kita mengukur kemampuan literasi murid di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum yang disederhanakan, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 yang utuh. Perbedaannya sangat dramatis, sangat signifikan. Tetap ada *learning loss*, pada kehilangan pembelajaran ya pada sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Darurat, tetapi kehilangan pembelajarannya itu hanya seperlima dari kehilangan pembelajaran sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 yang utuh. *Nah* jadi, pengurangan materi sesuatu yang sangat sederhana secara kebijakan, tetapi dampaknya pada literasi murid itu signifikan.

Kita juga punya data empiris di halaman berikutnya dari monev-monev yang kita lakukan pada penerapan Kurikulum Merdeka, implementasi Kurikulum Merdeka. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kemudian bisa menyesuaikan kurikulum dan pembelajarannya untuk fokus pada penguatan literasi. Jadi, ini di sekolah-sekolah yang kita ambil, sekolah-sekolah SD yang melayani banyak murid yang datang ke sekolah bukan hanya belum bisa membaca, tetapi belum bisa Bahasa Indonesia bahkan sebagian. Kalau mereka di hari pertama, di minggu pertama sudah harus diajari, sudah harus belajar Matematika, IPA, IPS tentu tidak ada efektif pembelajarannya.

Dengan Kurikulum Merdeka sekolah-sekolah seperti ini bisa fokus pada pembelajaran literasi Bahasa Indonesia dulu selama sebulan, dua bulan sebelum berlanjut ke pembelajaran yang lainnya.

Lanjut saja ke halaman 16. Kita juga sedang mengembangkan kurikulum model-model kurikulum yang bisa diadopsi sekolah dan daerah-daerah dengan karakteristik khusus, salah satunya adalah kurikulum untuk Papua, kita kembangkan dalam sekaligus untuk RAN ya, Rencana Aksi Nasional ya percepatan pembangunan Papua. Jadi, kita akan punya kurikulum khusus untuk Papua yang salah satunya fokusnya adalah pada literasi membaca. Kajian akademiknya kita lakukan tahun ini, tahun depan kita akan mulai pengembangan bukunya, modul-modulnya dan perangkat-perangkat yang lain.

Nah kemudian di halaman berikutnya, Kurikulum Merdeka juga mendukung transisi PAUD ke SD yang lebih menyenangkan sebagai fondasi dari literasi. Jadi, minat dan kebiasaan membaca itu yang perlu kita tumbuhkan pada PAUD dan SD awal dan Kurikulum Merdeka sangat mendukung itu, karena sekarang capaian pembelajarannya di awal SD tidak berasumsi bahwa anak-anak sudah bisa membaca.

Kalau di K-13 sebelumnya, buku teksnya sejak hari pertama SD itu sudah berasumsi bahwa anak bisa membaca. Ini yang kemudian menjadi tekanan bagi PAUD, TK-TK untuk mengajarkan calistung secara mekanis. Ini kita perbaiki di Kurikulum Merdeka dan kita kampanyekan bahwa pembelajaran Paud itu harus dilakukan secara lebih menyenangkan. Tidak boleh ada test calistung untuk masuk SD, yang penting dikuatkan adalah kesiapan untuk belajar secara lebih terstruktur dan itu bukan hanya urusan mekanis calistung, tetapi kesiapan sosial emosional juga selain kognitif.

Kemudian terkait dengan perbukuan di halaman 19. Intinya kami di pusat perbukuan BSKAP, Kemdikbud Ristek. Pertama-tama menyusun buku-buku teks yang ramah anak, yang membuat anak-anak ingin membaca. Jadi, kalau Bapak-Ibu melihat buku teks Kurikulum Merdeka, itu sudah sangat dominan komponen elemen visual yang menariknya dan ini tidak hanya di buku Bahasa Indonesia, tapi di semua mata pelajaran prinsip yang sama kita terapkan. Kita bekerja sama dengan banyak ilustrator yang sudah mendapatkan banyak penghargaan juga mereka dan sehingga hasilnya adalah buku-buku yang lebih menyenangkan, tidak tampak seperti buku teks, ini seperti buku bacaan yang menggunakan anak-anak untuk membaca.

Di halaman berikutnya, kita juga mengembangkan buku panduan untuk guru. Jadi, buku ini membantu guru untuk menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka tadi menggunakan buku teks yang kita sediakan.

Dan seperti sejalan dengan prinsip transisi PAUD-SD yang menyenangkan tadi, panduan guru untuk kelas satunya secara eksplisit meminta guru untuk membacakan. Jadi, tidak meminta guru untuk meminta muridnya membaca, tapi gurunya lah yang harus menjadi pemandu membaca aktivitas literasi di kelas.

Selain itu, kami juga membuat regulasi dan perangkat-perangkat untuk penjenjangan buku. Ini beberapa kali mendapatkan masukan dari Komisi X juga mengenai umumnya buku-buku bacaan yang berjenjang, ini sudah kita tindaklanjuti dan sekarang sudah ada regulasi dan perangkat-perangkatnya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, dan D, tapi B-nya dibagi menjadi 3, mulai pembaca dini, pembaca awal itu ada tiga tahapan, pembaca madya, benjana, madya dan mahir.

Kita sudah mulai mengembangkan model untuk tiap-tiap jenjang ini di halaman berikutnya ini saya secara cepat saja. Jadi, untuk jenjang A misalnya sudah ada beberapa buku yang sudah kita sediakan secara gratis juga. Untuk B1, B2, B3 sudah ada juga, untuk C jenjang selanjutnya sedang kita siapkan buku-buku modelnya, tapi yang sudah ada itu bisa diakses secara gratis

Lalu dari Perpusnas dan,
Bapak-Ibu sekalian,

Sesuai dengan apa yang di agendakan tadi dibacakan oleh Pimpinan Sidang. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran tentang tiga hal. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Kemudian yang kedua tentang kebijakan Merdeka Belajar Episode 23, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia yang barusan di bagian akhir paparan Mas Nino juga disampaikan. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan perkembangan penyusunan peta jalan literasi nasional sebagai wujud kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenko PMK dan beberapa kementerian dan lembaga.

Baik berikutnya, sebagaimana dicanangkan sejak tahun 2015 dan dimulai pada tahun 2016, program gerakan literasi nasional ini memiliki 5 tujuan ya, mulai membangun budaya literasi, menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Kemudian menguatkan pendidikan karakter, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, dan juga untuk melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Nah untuk menyelenggarakan program itu, yaitu mencapai tujuan-tujuan itu, Kemendikbudristek secara khusus itu menyisir apa tiga ranah, yaitu ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja ini tidak dikerjakan sendirian, tetapi dikerjakan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga. Kemudian juga dengan pemerintah-pemerintah daerah yang apa menjadi target pelaksanaan Program Gerakan Literasi Nasional ini.

Untuk kegiatan di sekolah misalnya, apa Kemendikbudristek membuat program membaca 15 menit pertama sebelum mereka memulai proses pembelajaran. Kemudian ada *lead* program literasi terintegrasi yang maksudnya adalah bukan bukan mereka itu belajar tentang bagaimana hanya membaca, tetapi juga program literasi yang terkait langsung dengan apa pencapaian pengetahuan ya, untuk materi-materi di sekolah, serta disampaikan oleh Mas Nino.

Kemudian ada Program Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro dan sebagainya.

Kemudian untuk di keluarga, itu ada program bersama dengan beberapa kementerian, termasuk misalnya Program Gerakan Literasi Keluarga. Di lapangan itu terjadi program kerjasama misalnya dengan Kementerian Sosial, kemudian BKKBN, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dalam Program Gerakan Literasi Keluarga.

Nah ini dilaksanakan untuk di lingkungan Kemendikbudristek sendiri melalui UPT-UPT yang menjadi kepanjangan dari pemerintah pusat gitu ya. Apakah itu yang Direktorat Jenderal Kebudayaan, Paudasmen, GTK, dan juga tentu yang ada di Badan Bahasa.

Kemudian, ada penyediaan bahan bacaan untuk keluarga. Ini juga apa dilakukan melalui UPT, kemudian ada program pelibatan masyarakat dalam program penulisan apa dan pelatihan penyiapan bahan-bahan literasi.

Kemudian, ada artikel pendidikan keluarga. Ini juga dilakukan untuk menyisir apa fokus di dalam keluarga. Kemudian untuk di masyarakat ya, itu ada beberapa program seperti yang tercantum di sini, banyak sekali.

Kami juga membuat program kerja sama dengan BUMN, misalnya dengan PT Pos, kemudian juga dengan masyarakat itu untuk mendistribusikan buku-buku yang diperoleh dari sesama anggota masyarakat. *Nah*, buku-buku ini disebar, apakah itu melalui program apa motor bergerak begitu atau melalui program penyebaran buku-buku di komunitas-komunitas melalui TBM, Taman Bacaan Masyarakat.

Nah, ini yang kami lakukan sepanjang 2016-2019 yang capaiannya pada halaman berikutnya, yang capaiannya pada halaman berikutnya kira-kira bisa digambarkan pada tahun 2016 itu penyediaan bahan bacaan untuk yang dikelola di Kementerian Pendidikan sendiri, itu memang masih sangat terbatas baru 170 bahan bacaan. Ini tahun pertama penyelenggaraan Gerakan Literasi Nasional.

Kemudian keterlibatan dari provinsi cukup banyak ada 34, itu sudah menyisir semua provinsi waktu itu, kemudian komunitas bacaannya karena memang bukunya sangat terbatas begitu, sehingga penyebarannya juga belum meluas.

Kemudian ada program pelatihan untuk fasilitator literasi, kemudian pemberdayaan anak-anak anggota komunitas baca. *Nah*, ini melalui program pemberdayaan apa para pemuda begitu, kami selenggarakan pelatihan dan mereka ikut terlibat di dalam Program Gerakan Literasi Nasional ini.

Tahun 2017, 2017 buku yang diproduksi itu ada 338 bahan-bahan bacaan, kemudian ada penambahan pada 2017 itu ada anggaran tambahan dan menjadi 508 bahan bacaan, lalu 2018 itu meningkat lagi ya ketersediaannya ada tambahan 338, sehingga ada 846 bahan bacaan yang tersebar di 34 provinsi.

Jadi, setiap tahun sebetulnya ada peningkatan jumlah bahan bacaan dan juga jumlah komunitas yang terlibat. *Nah* di tahun 2019, itu sudah tersedia 1.184 bacaan yang ini semua kami masukkan di dalam bentuk buku digital. Sayangnya memang kami pada sampai tahun 2019 itu belum bisa mencetak buku yang dalam jumlah banyak. Karena lagi-lagi ini urusan alokasi anggaran yang diberikan kepada kami begitu sangat terbatas, sehingga yang di yang bisa kami lakukan saat itu adalah mengubah buku-buku yang apa siap itu menjadi buku digital dan seperti tadi Mas Nino sampaikan, itu kami muat di dalam laman Kemendikbudristek ada Budi, Buku Digital. Kemudian itu di akses secara gratis gitu ya.

Kemudian tahun 2020, ada perubahan kebijakan bagaimana kita menyisir program gerakan literasi nasional itu, supaya tidak sebatas kepada penyediaan buku, tetapi justru melalui satu program yang jauh lebih komprehensif. Karena ternyata hasil evaluasi kami pada tahun 2020 itu, buku-buku yang disebar, walaupun jumlahnya memang masih belum banyak, ternyata banyak yang tidak kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru, karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara memanfaatkan buku yang sudah tersedia itu.

Bahkan hasil apa apa monev yang dilakukan oleh teman-teman di UPT, ada sejumlah sekolah yang bahkan bukunya itu belum dibuka gitu apa dari dari boxnya dari kardusnya. Karena mereka merasa ini sayang buku ini bagus katanya, tapi apa kalau nanti dipakai cepat rusak itu dan tidak ada gantinya gitu. Karena, ketika kami kirimkan kami katakan ini bukunya gratis dan silakan rusak pun tidak apa-apa kalau dipakai gitu, tapi beberapa sekolah kemudian mengatakan ini sayang ini bukunya kalau kemudian rusak tidak ada gantinya gitu.

Nah pada tahun 2020 ya, itu kami ubah polanya dan baru terlaksana pada tahun 2022 melalui program tambahan anggaran, yaitu dengan adanya BA BUN. Kami membuat 3 pilar program penyediaan buku itu tidak hanya sampai kepada cetak, kemudian kirim.

Nah tadi Mas Nino sudah sampaikan di halaman berikutnya, terus. *Nah*, ini juga sudah disampaikan di ruang ini oleh Pak Menteri waktu itu. Ada tiga pilar program yang disusun sejak tahun 2020, kemudian terlaksana pada tahun 2022 penyebarannya.

Yang pertama pemilihan dan penjenjangan buku bermutu. Kalau dulu sebelum-sebelumnya itu buku dibuat disiapkan oleh para penulis dari perspektif orang tua. Apa yang baik menurut orang tua, itulah yang kemudian ditulis. Kemudian buku non teks ini bahkan tidak menarik, karena yang isinya itu hanya berupa narasi, berupa teks yang kadang-kadang tidak ada gambarnya sama sekali. Bahkan dalam dialog antara Mas Menteri dengan para guru, banyak buku-buku bacaan non teks, itu untuk misalnya kelas 3 SD sudah berisi tentang bagaimana cara beternak ikan, misalnya. Bagaimana cara apa menanam apa kopi misalnya. Anak SD sudah diajari yang seperti itu dan itu buku-buku nonteks.

Nah, pada saat kami mengembangkan pola baru ini ya, buku dipilih, dijenjangan, penjenjangan tadi sampaikan oleh Mas Nino ada 7 jenjang. Itu didasarkan kepada hasil kajian bersama anak-anak yang akan sesuai apa dengan usianya gitu. *Nah*, anak-anak ini dimintai pendapat bagaimana mereka akan bisa mencintai buku, mau membacanya, karakternya seperti apa dan harus berapa banyak teksnya dalam buku itu, gambarnya harus seperti apa, kemudian pada saat berdiskusi itu melibatkan para orang tua, guru, dan para ilustrator. Sehingga, mereka betul-betul mengetahui apa yang diharapkan oleh calon pembaca dalam hal ini anak begitu.

Nah pada tahun 2021 ini kami tuntaskan, lalu 2022 apa penyusunan buku ini selesai begitu dengan pola seperti itu dan kemudian kami lakukan pencetakan, pengiriman. Kemudian tahap ketiganya adalah kami melakukan pelatihan kepada fasilitator, kemudian melakukan pendampingan di tingkat nasional, regional, kabupaten kota, bahkan sampai kepada sekolah.

Nah ini yang tadi disampaikan oleh Mas Nino itu, kami mengirimkan lebih dari 15,3 juta buku menyisir sekolah-sekolah yang menurut data hasil asesmen nasional, itu memiliki tingkat kemampuan paling rendah. *Nah* ada 20.000 sekolah, 20 ribuan sekolah yang apa menerima buku itu dan satu sekolah ada yang menerima sampai lebih dari 1.500 buku ya.

Nah, ini untuk memenuhi apa apa namanya keperluan di masing-masing sekolah, itu untuk SD. Kemudian untuk yang PAUD-nya ada yang menerima antara 80 sampai 120 buku bacaan.

Nah, ini kami lakukan pendampingan oleh para apa ahli membaca begitu yang profesional, kemudian mereka pelatihan secara berjenjang, kami minta utusan dari masing-masing provinsi dilatih secara nasional, mereka kemudian melakukan pengimbasan kepada fasilitator, guru-guru di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota.

Nah pada halaman berikutnya, itu bisa dilihat ya bagaimana buku-buku non teks ya, buku bacaan non teks sebelum buku ini diluncurkan, di situ ada contoh misalnya beternak ikan lele, padahal itu masih untuk anak SD. Kemudian Pasar Apung, asyiknya mancing, bercocok tanam. Ini semua adalah buku yang disusun sebelum tahun 2020.

Pada tahun 2021 dan kemarin tahun 2022, buku-buku yang disusun itu ada disebut bagian sebelah kanan. Di situ tampak beda sekali bagaimana karakteristik dari buku yang dihasilkan, sehingga jauh lebih menarik bagi anak-anak yang memang tingkat kemampuan membacanya masih pada tahap awal dan penyediaan buku-buku ini untuk tahun 2022 baru sebatas untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD, itupun baru pada anak SD tingkat awal. Itu yang apa dilakukan oleh kami.

Nah buku-buku ini, target awal itu memang kami ingin menyisir sekitar lebih dari 40 ribuan sekolah, tapi karena anggaran yang disediakan waktu itu hanya disetujui 136 miliar dan itu hanya sekitar setengahnya itu, maka jumlah sekolah pun menurun drastis dan itu baru sampai ke angka 20 ribuan saja.

Ini yang akhirnya kami meng apa, mengunggah buku-buku itu untuk di akses secara gratis melalui laman kami gitu ya, ada melalui buku digital di Pusdin, kemudian di Pusbud, kemudian ada juga tautan dengan mitra-mitra yang dari komunitas. Misalnya dengan literasi dari *Cloud*, dengan *lessread*, itu kami unggah ke sana supaya siapapun bisa mengaksesnya.

Nah sampai saat ini, itu ya ada beberapa inisiatif yang dibuat oleh pemerintah daerah, karena mereka tahu ada buku-buku ini, mereka mengirimkan apa stafnya gitu untuk datang ke badan bahasa. Kemudian

mereka membawa hard disc gitu, kemudian mengunduh file-file ini, kemudian mereka bawa ke sekolah dan itu menjadi tanggung jawab pembiayaannya mendistribusikan kepada pihak sekolah melalui dinas-dinas pendidikan di pemerintah, kabupaten kota.

Nah, ini banyak pemerintah daerah yang sudah melakukan itu, tapi jumlahnya memang kalau dilihat secara keseluruhan apa belum belum apa sampai 25% lah begitu ya, jumlahnya masih masih sedikit dibandingkan dengan 500-an kabupaten kota.

Kemudian berikutnya, *nah* pada proses cetak dan kirim, kami bekerjasama ini dengan apa masyarakat gitu ya dan *alhamdulillah* kami juga menerima bantuannya untuk pengiriman buku ini dari TNI. Karena, untuk mencapai daerah-daerah yang jauh begitu, tidak bisa dijangkau oleh transportasi biasa gitu. Maka TNI baik TNI AL, TNI AU begitu kemudian juga ke daerah-daerah yang di pedalaman gitu, daerah yang agak rawan untuk gangguan keamanan, itu mendapat bantuan dari TNI AD.

Nah sehingga, buku-buku yang dikirim ini dikawal oleh mereka gitu ya, karena ada beberapa kejadian yang disangkanya ini bantuan apa gitu. *Nah* kemudian, ada pada semacam gangguan keamanan gitu disangkanya ini bantuan persenjataan atau apa gitu, tapi ketika dibuka ternyata buku, *nah* kemudian baru di ini dipersilakan untuk menuju ke daerah-daerah yang apa menjadi tujuan.

Nah, ini wilayah-wilayah yang menjadi sasaran kemarin itu di sekitar 20 ribuan sekolah PAUD dan SD itu di 470 kabupaten kota. Jangkauannya memang belum sangat luas ya. Kami akui ini belum sangat luas, karena keterbatasan jumlah buku yang dicetak.

Kemudian berikutnya terkait dengan pelatihan dan pendampingan, seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa dilihat dibagian kiri, ini beberapa sekolah masih tetap menumpuk buku ya di perpustakaan atau di tempat, di ruang-ruang kepala sekolah begitu, di gudang, kemudian tidak dimanfaatkan.

Nah sementara, setelah kami melakukan pelatihan, buku itu ditata seperti terlihat di bagian sebelah kanan gambarnya. Jadi, ada bantuan untuk penyediaan rak-rak buku ya, kemudian bagaimana buku itu harus ditata itu kami melakukan pendampingan.

Kemudian untuk pemanfaatan buku bacaan sendiri, itu ada seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nino, ada buku panduannya kepada sekolah gitu. *Nah*, sehingga aktivitas membaca itu menjadi jauh lebih menyenangkan, karena ada bimbingan yang langsung dilakukan oleh guru kepada anak-anak bagaimana cara membaca yang baik begitu. *Nah*, anak-anak menjadi terfasilitasi dan itu kelihatan di gambar yang sebelah kiri yang sebelumnya, kemudian setelah dilakukan pendampingan bagaimana membaca buku itu, ada yang di bagian sebelah kanan.

Nah pendampingan dan pelatihan yang dilakukan, itu datanya, halaman berikutnya. *Nah*, ini yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Pelatihan untuk SD ya di kawasan 3T ini sudah melibatkan 1.998 SD, kemudian ada 139 SD yang pelatihannya melalui Program Kampus Mengajar episode itu, apa *batch* ke-5 ya, angkatan kelima. Kemudian ada TOT dari Widya, Widyaiswara, Widyaprada itu 5.472, kemudian di PAUD-nya, itu ada 5.967 PAUD, kemudian intervensi khusus untuk SD itu ada 6.900-an sekolah, sehingga jumlah semuanya itu sudah ada 20.558 PAUD dan SD.

Nah, ini yang kami lakukan selama pendampingan ya dan sampai saat ini pun pendampingan masih terus terjadi ya di apa, sekolah-sekolah dan apa kami melakukan monitor yang cukup ketat itu supaya betul-betul buku ini dimanfaatkan dengan baik begitu.

Nah berikutnya, ini contoh-contoh praktik baik dalam pemanfaatan buku di sekolah, tadi Mas Nino juga sampaikan kalau sekolah itu tidak eh apa cukup menerima buku, maka ada sekolah yang memanfaatkan proyektor. *Nah* proyektor ini misalnya menjadi bagian dari buku besar ya, *big book*. *Nah*, itu misalnya terjadi di sebuah sekolah di Ende, di NTT memanfaatkan proyektor dan perangkat digital untuk menggantikan *big book*, itu yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Kemudian, *nah* di sini tampak ya pada data ini ada perubahan apa bagaimana kami membuat penyiapan buku. Sengaja ini kami pisahkan dari tahun 2019 supaya kelihatan bedanya, bagaimana program buku yang dibuat sebelum ada perubahan kebijakan dengan yang sesudah adanya kebijakan penyusunan jenis buku yang jauh lebih bermutu. *Nah* ini apa datanya, bisa dilihat pada halaman 18.

Kemudian halaman 19, ini ada buku-buku yang dialih wahanakan, ada yang ke dalam bentuk digital, kerjasama kami dengan Ditjen Vokasi, kemudian dengan Ainaki, dengan SMK.

Nah ini, ada buku-buku yang kemudian difilmkan ya, jadi film animasi dan ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik begitu dari pihak sekolah ketika sekolah bisa mengakses ini, sehingga anak-anak itu setelah membaca buku ternyata ada juga filmnya gitu. *Nah* ini, sayangnya ya jumlahnya masih belum banyak ya. Kami baru misalnya untuk film animasi ini baru punya 32 film animasi dari jumlah 716 buku yang dikirimkan.

Kemudian, terkait dengan pemberdayaan komunitas literasi dan literasi generasi muda, ini program yang kami galakkan di tahun 2020 sampai tahun ini juga masih terus berjalan dan beberapa Anggota Komisi X yang kebetulan apa sudah turun ke lapangan juga, ada yang apa mengikutsertakan program-program bersama para generasi muda dan komunitas-komunitas di taman-taman bacaan masyarakat. Kemudian di komunitas-komunitas literasi yang fasilitasnya adalah terkait dengan buku-buku, pemanfaatan buku-buku bacaan bermutu itu begitu.

Kalau terkait dengan anggaran, tadi disampaikan juga oleh Pimpinan. Jumlah anggaran yang kami siapkan untuk tahun 2023 ini ada sekitar 123 miliar untuk program apa penguatan literasi ini. Itu bagian yang kedua.

Kemudian bagian yang ketiga terkait dengan peta jalan pembudayaan literasi nasional. *Nah*, kami dalam beberapa kali diskusi dengan tim yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan di sini juga ada Ibu Asdep ya, Ibu Moli bersama dengan kawan-kawan yang lain dari Kementerian lain. Kami memang secara rutin melakukan diskusi tentang ini dan dari naskah akademik yang kami terima, ya waktu itu kemudian kami melakukan kajian dan ini adalah hasil kajian yang kami lakukan ya dan ini akan menjadi bahan diskusi lanjutan untuk memperbaiki apa rencana penyusunan peraturan terkait dengan peta jalan pembudayaan literasi nasional ini.

Nah, di dalam naskah itu ya nampak jelas bagaimana literasi ini harus menjadi bagian apa kolaborasi yang merupakan sinergi antar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.

Nah di situ ada Kemenko PMK ya, kemudi Setkab, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbudristek, ini yang secara langsung apa kami lakukan diskusi intensifnya seperti ini.

Nah kemudian, kami menyandingkan ya apa yang ada dalam naskah akademik ini dengan program-program yang sudah menjadi inisiatif Kemendikbudristek melalui Program Merdeka Belajar.

Beberapa diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Mas Nino ya, ada asesmen nasional, kemudian rapor pendidikan, SPM pendidikan, kampus mengajar, organisasi sekolah dan guru penggerak, kurikulum merdeka dan sebagainya yang ini semua nanti akan mengarah kepada tiga aspek utama di dalam peta jalan pembudayaan literasi nasional.

Pertama terkait dengan aksesibilitas, ini yang akan menjadi fokus apa penyusunan peraturan itu. Kemudian masalah pembudayaan literasi dan yang ketiga target atau tentang kompetensi apa yang akan dicapai dalam program pembudayaan literasi nasional ini.

Nah, yang pertama terkait dengan aksesibilitas, misalnya. Ini ada tiga hal halaman berikutnya, *nah* ada tiga hal yang akan menjadi fokus ya dalam kaitan dengan aksesibilitas ini. Yaitu terkait dengan ketersediaan fasilitas serta bahan bacaan pendukung kegiatan kemudahan literasi yang berkualitas, jumlahnya cukup, dan bisa terdistribusi secara merata. Jadi, ada tiga hal ini yang akan harus tercakup begitu.

Nah tetapi tentu saja apa ada juga hal-hal yang menjadi apa bahan-bahan yang harus dipertimbangkan. Di situ ada indikator-indikator yang kami terapkan itu ya, itu untuk bagian pertama terkait dengan aksesibilitas.

Kemudian yang kedua terkait dengan budaya, ya budaya berliterasi. Budaya berliterasi ini memiliki beberapa komponen, misalnya membaca bahan bacaan cetak, mengunjungi perpustakaan sekolah, membaca buku bacaan digital. Ini bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bisa ditumbuhkan, sehingga kompetensi literasi dan numerasi yang tadi sampaikan itu betul-betul bisa tercapai gitu. Karena program literasi ini tidak mungkin tercapai kalau tanpa kegiatan atau tindakan pembudayaan yang apa berkelanjutan gitu. *Nah*, inilah yang kemudian kami jadikan fokus, ini harus ada model pengaturannya begitu, sehingga bisa dilaksanakan.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan kompetensi. Apa sih sesungguhnya dari program prioritas ini yang ingin dicapainya, jenis apa gitu, kompetensinya apa? *Nah*, ada tiga elemen ya, pertama kemampuan untuk bisa menemukan informasi. Tadi Mas Nino sudah sudah menjelaskan ya, bagaimana kecakapan literasi, kecakapan numerasi dalam bahasa dan matematika ini berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan ataupun pengetahuan seseorang.

Yang kedua, itu kemampuan untuk menafsirkan dan mengintegrasikan dan yang ketiga, bagaimana bisa mengevaluasi dan merefleksi dan juga tentu saja mengkreasi.

Nah, ini tiga hal yang menjadi fokus ketika kami harus membahas masalah peta jalan ini. *Nah*, ketiga hal ini yang tadi ya yang mulai apa aksesibilitas, kemudian budaya, dan kompetensi ini. Ini akan harus betul-betul ada di dalam payung pengaturan terkait dengan pembudayaan literasi nasional ini dan ini yang kemudian nanti akan kami apa bahas lebih lanjut gitu ya bersama dengan tim yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, sehingga apa pun bentuknya pengaturan itu, apakah dalam bentuk Perpres, rencana aksi nasional atau apa pun wujudnya, hal-hal ini betul-betul terakomodasi begitu.

Demikian, Pimpinan, Bapak-Ibu para Anggota Komisi X yang saya hormati dan para Pimpinan dari kementerian/lembaga yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan nanti tentu kami mohon masukan, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian kami di dalam tiga isu yang saya sampaikan itu.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Prof Endang.

Kemudian, lanjut Ditjen Pembangunan Daerah, Kemendagri, Bu Sri Purwaningsih, silakan.

**DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
(SRI PURWANINGSIH):**

Baik,

Yang terhormat Pimpinan DPR RI yang hadir pada kesempatan kali ini,
Yang saya hormati para Anggota Dewan, dan
Yang saya hormati Bapak-Ibu Wakil Pemerintah dari Kemendikbud,
Ada Pak Amiruddin Aziz,
Pak Anindito,
Dari Kemenko PMK ada Ibu Moli,
Dari Kemenkoinfo ada Pak Boni,
Dari Kemendes PDTT ada Pak Radinal,
Dari Perpunas dan BKN RI, Pak Ahmad.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan,
Anggota Dewan yang terhormat.

Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi sudah diuraikan oleh narasumber terdahulu dari Kemendikbud bahwa kebijakan nasional terkait literasi dan gemar membaca, itu merupakan wujud dari komitmen pemerintah pusat dan dalam rangka membangun negara ini, artinya dalam konteks pembangunan nasional.

Nah, kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disampaikan tentu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dalam konteks pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam kebijakan nasional tersebut.

Dalam pembangunan daerah Bapak-Ibu sekalian, bahwa merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Kita punya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan sudah diuraikan dan dibagi secara detail menjadi 32 urusan. Kalau tadi terkait pendidikan sebenarnya berbicara tentang literasi dan gemar membaca itu, tadi sudah banyak diuraikan oleh Bapak Anindito dan Bapak Amiruddin, maka saya pada kesempatan kali ini berfokus kepada masalah urusan yang berkaitan dengan perpustakaan.

Jadi, berbicara urusan pendidikan itu merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang tadi sudah diuraikan juga sebagai masuk dalam standar pelayanan minimal.

Nah, berbicara urusan perpustakaan itu merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan urusan bidang perpustakaan tadi, di dalam lampiran Undang-Undang 23 itu sudah diuraikan ada tiga sub urusan. *Nah*, yang terkait dengan masalah gemar membaca ini ada di sub urusan pembinaan perpustakaan, di mana pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Ini gelondongan dari apa yang terdapat di dalam Undang-Undang 23, namun secara detail akan dielaborasi lebih lanjut di dalam peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah di dalam pelaksanaan secara detailnya.

Lanjut ke *slide* nomor 8, kami ingin menyampaikan bahwa terkait perpustakaan, urusan perpustakaan ini. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kebijakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk dukungan. Karena Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan urusan dan pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan 32 urusan itu benar-benar bisa dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Permendagri-Permendagri inilah Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman kepada pemerintah daerah.

Yang terkait dengan perpustakaan, ada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, *next slide*. Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jadi, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan evaluasi terkait pelaksanaan 32 urusan pemerintahan di daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan ini, ada dua indikatornya, yaitu nilai kegemaran membaca masyarakat, dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Ini yang menjadi ukuran bagaimana kinerja pemerintah daerah sukses atau tidak di dalam melaksanakan urusan bidang perpustakaan melalui dua indikator ini.

Nah lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hari ini Pemerintah Daerah sudah melaksanakan rencana kerjanya, karena ini sudah tahun 2023 yang terkait dengan bidang perpustakaan. Ada kinerja pembangunan literasi masyarakat meningkat, ini ukurannya di dalam Permendagri Nomor 81, pemerintah daerah diminta untuk menyusun rencana kerjanya. Di dalam rencana kerjanya itu ada kinerja terkait pembangunan literasi masyarakat meningkat.

Untuk provinsi, indeks pembangunan literasi masyarakat, ini indikatornya dan untuk kabupaten/kota juga sama, indeks pembangunan literasi masyarakat.

Yang kedua, ada kinerja terkait peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Indikator yang ada di provinsi yaitu, nilai tingkat gemar membaca masyarakat dan kabupaten/kota juga nilai tingkat gemar membaca masyarakat.

Ini dua indikator dalam dua kinerja ini semuanya tetuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 ini dan apa yang tetuang di dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah itu, maka itulah yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Karena rencana kerja pemerintah daerah menjadi acuan dalam penyusunan Perda APBD-nya, sehingga ketika kebijakan pemerintah pusat menegaskan agar pemerintah daerah melaksanakan yang itu juga sudah sesuai dengan Undang-Undang 23 nya, maka kemudian dituangkan di dalam rencana kerja setiap tahunnya dan itu menjadi dasar bagi penyiapan APBD-nya.

Di dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, juga menekankan bahwa pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dan pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inilah dasar bagi pemerintah daerah menyiapkan anggarannya dan ini sudah sejalan dengan apa yang ada di dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut, lebih detail lagi terkait bidang perpustakaan ini, Menteri Dalam Negeri juga memberikan arahan, memberikan acuan untuk verifikasi ya, inventarisasi pemutakhiran adat Kemendagri tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Jadi, kalau dulu kita mengenalnya kayak mata anggaran gitu ya. Mata anggaran di sini juga untuk urusan perpustakaan ini, sudah diberikan arahan untuk pemerintah provinsi ada kegiatan pembudidayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi dan ini sama di kabupaten kota juga melakukan ini, diminta untuk melakukan ini dengan kegiatan nomenklturnya sudah diarahkan melalui Kemendagri ini.

Yang pertama yaitu, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi, maupun kabupaten kota, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus, serta masyarakat dan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan pemilihan duta baca tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Nah ini, kemudian masih ada lagi satu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa. Ini nanti barangkali dengan Pak Rafdinal. Ada bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan, taman bacaan desa, sanggar belajar milik desa, dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana perpustakaan, taman bacaan desa, sanggar belajar desa, dan pengelolaan perpustakaan milik desa, pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan, taman bacaan desa. Ini merupakan komitmen Menteri Dalam Negeri dalam mendukung urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya pemerintah daerah di bidang perpustakaan ini.

Jadi, terkait literasi dan gemar membaca ini, kami memastikan bahwa setiap tahun pemerintah daerah menyusun rencana kerjanya, menyiapkan anggarannya, dan menyusun kegiatan-kegiatannya, sehingga apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat secara sektoral, baik dari Perpunas, dari Kemendikbud semuanya bisa mendarat dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Demikian, hal singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon arahan lebih lanjut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Sri Purwaningsih.

Lanjut ke Dirjen Percepatan dan pengembangan, eh Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes, Pak Rafdinal.

Silakan, Pak.

DIRJEN PERCEPATAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA DAN PDT:

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, eh Komisi X mohon maaf biasa Komisi V, Pak, Kemudian juga, Bapak-Ibu Pimpinan tinggi JPT Madya dan, JPT Pertama yang hadir di rapat yang sangat strategis ini,

Pada saat ini kami mungkin Pak Pimpinan, tidak bisa langsung seperti mengurai seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Dikbud tadi, Kemenristek tadi, karena menjadi tusi beliau begitu. Tapi, kami akan melaporkan tentang bagaimana kolaborasi percepatan permohonan daerah tertinggal yang menjadi pengampu kami dan pada saat ini kami juga bukan hanya kami saja yang hadir, tapi dari Kementerian Desa ada Ditjen Pengembangan Investasi dan apa pengembangan investasi diwakili Pak Sesjen, Pak Sesjennya Pak Sudrajat dan idealnya Pak Pimpinan. Mungkin juga besok juga bisa berkenan diundang juga Dirjen PDP Pembangunan Desa dan Pedesaan yang mengampu kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, Pak.

Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu kita langsung ke *slide* apa ke *slide* nomor 2 ya, *next* setelah ini bahwa PPDT (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) 2020-2024 itu ada beberapa sasaran dan kebijakan gitu. Bahwa bagaimana indikator makro IPM dan PPM betul-betul harus kita kejar ya atas kesenjangan. Ketika kita bicara tentang IPM rata-rata nasional sudah diangkat 72 di tahun 2019 yang lalu, kita saat ini 2024 yang datang minimal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 62,2.

Kemudian ketika bicara tentang presentasi penduduk miskin, ada 24% Pak. Bisa dibayangkan betapa senjangnya antara daerah yang sudah maju dengan sarana nasional dengan daerah tertinggal dan minimal 25 kabupaten dari 62-nya bisa kita tuntaskan.

Apa saja kebijakan-kebijakan yang kita coba lakukan, yaitu pembunuhan pelayanan dasar publik dan sarana prasarana, bisa jadi satunya kebutuhan dari sarana prasarana dari perpustakaan. Baik di desa, termasuk juga di Kabupaten Tertinggal untuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan lokal, dan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya,

Bapak dan Ibu yang kami hormati *next* saja.

Bapak dan Ibu, ini adalah semacam rata-rata klasifikasi ya indeks ketertinggalan. Kita punya 6 kriteria dan 20 indikator berdasarkan PP 78/2014 tentang Percepatan Permohonan Daerah Tertinggal, sehingga berdasarkan kita bisa setiap tahunnya bisa menghitung dan mengevaluasi berapa capaian daerah tertinggal bisa kita entaskan di tahun 2024 yang akan datang.

Saya tidak bacakan satu persatu, Bapak dan Ibu ya.

Selanjutnya, Bapak dan Ibu ya atas kolaborasi ya kita bersama, tentu dari kementerian dan lembaga di pusat, kemudian teman-teman yang ada di apa kabupaten tertinggal, dan provinsi yang ada daerah tertinggal, termasuk juga hubungan dukungan dari APBDes yang ada di kabupaten daerah tertinggal. Maka saat ini capaian indikator makro kita saat ini ya minimal kita di 2023 ini harus mencapai 61,5 untuk IPM-nya dan untuk persentase penduduk miskinnya, kita harus mencapai di tahun 2023 ini 24,26% ya.

Jadi, capaian tahun 2002 masih terdapat gap sebesar 0,93 dari sasaran IPM nya dan terdapat gap sebesar -11,64 dari rata-rata internasional tahun 2022. Begitu juga tentang kemiskinan, sebesar ada gap sebesar -15,02% dari rata-rata IPN nasional di tahun 2022. *Next* saja.

Ini pencapaian indikator makro ya berdasarkan wilayah pulau. Karena, daerah tertinggal itu 62 itu terbagi kepada ada 7 kabupaten di wilayah pulau Sumatera, 14 kabupaten yang ada di Nusa Tenggara, yaitu satu NTB, dan 13 nya di NTT, 3 kabupaten di Sulawesi khususnya 3 kota di Sulawesi Tengah,

kemudian untuk Maluku 6 di Maluku dan 2 di Maluku Utara, dan 30 kabupatennya ada di Pulau Papua atau hampir 50% nya.

Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Kami coba laporkan juga bahwa capaian komposit daerah tertinggal dari potensi entas saat ini dari data kita dari 2022 *alhamdulillah* akan bisa mencapai nantinya 25 dari data 22 ya kita akan bisa terbitkan di 2023 ini, minimal target kita 25 daerah tertinggal. Karena terus perintah menteri itu bukan 25 kabupaten tertinggal, tapi minimal tahun 2024 itu 32 Kabupaten pak, maka kita harus mencapai target ini Bapak dan Ibu.

Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Ini adalah semacam daerah tertinggal potensi terentaskan karena minimal dari Indeks Komposit Kumulatif berdasarkan data pandangan tertinggal itu rata-rata itu kuantitatifnya sudah 60, nilainya sudah 60 rata-rata 3 tahun sehingga bisa kita dorong untuk kabupaten entas di tahun 2024 yang akan datang. Ini sangat tanggung sekali pak. Nanti akan kami coba sampaikan bahan-bahannya kalo diminta.

Kemudian, Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Next saja, ini adalah semacam afirmasi Kementerian lembaga ya, kolaborasi ya yang sudah konkret tentunya Bapak dan Ibu bahwa di sini berdasarkan enam kriteria itu kementerian/lembaga sudah kita petakan Bapak dan Ibu ya. Sudah kita petakan untuk isu kriteria peningkatan ekonomi masyarakat, apa saja isunya seperti peningkatan keterkaitan dan integrasi pengembangan ekonomi wilayah dengan kawasan strategis seperti KEK sudah kita petakan, yaitu Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Koperasi UKM, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kemenparekraf, Kemensos dan termasuk Pemda dan pelaku usaha lainnya. Ini satu kriteria belum lagi untuk kriteria yang lainnya bapak dan ibu, mohon izin kami *skip* saja Bapak dan Ibu baik saja.

Next saja,

Bapak dan Ibu kami hormati.

Bahwa afirmasi kementerian/lembaga dalam intervensi Pembangunan Tertinggal sejak Tahun 2022 ini sangat nyata Bapak dan Ibu, walaupun kondisi Covid-19 ya melanda dunia tahun 2020, ada keterlibatan 16 Kementerian/Lembaga yang menyosor terhadap 62 daerah tertinggal dengan 1499 kegiatan, program kegiatan dari 16 kementerian/kembaga. Walaupun Covid ya atau *automatic adjustment/refocusing* keterlaksanaannya 41,63% Pak, ini sudah kita hitung bersama dengan teman-teman Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas.

Kemudian di tahun 2021 yang lalu ada 22 Kementerian 1.402 program kegiatan ya, kemudian keterlaksanaan di tahun 2021 adalah 64,98% pak hampir 65%.

Kemudian di Tahun 2022 dari 22 kementerian/lembaga mengeroyok sehingga saat ini 22 itu hanya 21 kementerian/kembaga tapi jumlah intervensi program kegiatannya naik gitu Pak, itu 2.439 kegiatan dan keterlaksanaannya kemudian 74,05% kalo yang menurut lembaga untuk daerah tertinggal Pak, karena secara kementerian/lembaga Sektor ketika melihat daerah tertinggal ini biasanya tidak melihat secara strategis nasional Pak. Selalu dilupakan dan ditinggalkan maka kami berusaha untuk mendampingi sehingga dukungannya bukan hanya kami saja ketika kita melakukan komunikasi dengan daerah kami kontak namanya T-2 pelaksanaannya tapi ditampi oleh Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas termasuk ditjen tempatnya Bu Ning, Kementerian Luar Negeri dan termasuk Kementerian keuangan dan sudah kita lakukan secara konkrit. Kemudian selanjutnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saat ini 2024 *Alhamdulillah* sudah 2023 ya sudah ada Keppresnya pak pimpinan, Kepres 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional PPDT jadi ada perintah presiden kepada para menteri yang tentu harapannya dalam keterlaksanaannya tentu harapannya di atas 90%. Jadi tidak seperti 74% dan 2024 kita sudah mengkoordinasikan 25 Kementerian/Lembaga yang sudah memberikan daftar praktek intervensi kegiatan mereka di tahun 2024 yang akan datang dan itu betul-betul kita kombinasikan dan tentunya ini menjadi bahan untuk rancangan Keperes RAN PPDT 2024 yang sudah ada di meja Presiden saat ini Bapak dan Ibu.

Selanjutnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Ini semacam *highlight* intervensi program kegiatan dalam RAN-PPDT 2023 ya, Kemudian untuk rencana intervensi Perpustakaan Nasional pada RAN-PPDT 2023 seperti penyaluran bantuan buku, siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal atau titik 3T ada 5 kegiatan hasil koordinasi kami dengan Perpunas ya. Kemudian juga pemberian bantuan pojok baca digital satu kegiatan dan ada 15 kegiatan pemberian bantuan peningkatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu dan masuk dalam KEPRES 27/2022

Ini adalah rincian Rencana Intervensi Perpunas pada RAN PPDT tahun 2023, yaitu pemberian bantuan peningkatan transformasi layanan perpustakaan bersih inklusif sosial pada 13 kabupaten Daerah Tertinggal ya. Kemudian ada pemberian bantuan pojok baca digital di kawasan Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah satu perpustakaan dan ada penyaluran bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah Terdepan, Terluar dan

Tertinggal pada 5 Kabupaten daerah tertinggal. Ada 8 perpustakaan ada 4 dan lain-lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Ini semacam keterlibatan kementerian lembaga dalam RAN-PPDT 2024, dimana ada kompilator usulan gitu pak, kami didampingi oleh teman-teman dari Kemenko PMK kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda dan mengawal dan termasuk Kementerian Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Desa,

Jadi bapak dan ibu dari komunikasi ini Bapak dan Ibu, kami laporkan kepada kita semua dalam sebuah rapat yang terhormat ini ketika kami mengajak teman-teman Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas *fiscal-gap* yang sangat lebar antara daerah tertinggal dengan daerah sudah maju, sehingga ada kebijakan dari Kementerian Keuangan PMK 208 2022 tentang dana insentif fiskal bagi 62 daerah tertinggal dana satu triliun dibagi untuk 60 daerah tertinggal. Untuk apa? Pembangunan fisik sarana-sarana yang dibutuhkan termasuk juga kemiskinan ekstrem.

Ya mungkin termasuk juga mungkin harapan kita akan dipaparkan oleh Kementerian Dikbud Ristekdikti ini betul-betul bisa menjadi pedoman kita untuk kita koordinasikan dengan teman-teman daerah juga termasuk kementerian lembaga.

Kemudian ada pengampu usulan saat ini tercatat baru 25 kementerian/lembaga termasuk Perpustakaan dan harapan Kami nanti akan ada menambah susunan lagi 4 bu, mohon maaf 2 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo. Karena saat ini masih dalam isu untuk apa masukan di internal UP1 itu kerja salah satu di dua kementerian lembaga ini, harapannya Bapak dan Ibu ada kontribusi dari yang konkret sehingga betul-betul keroyokan nyata gitu pak,

Kemudian ada intervensi inisiatif dari BRIN kemudian Kementerian Bappenas, BNPP, kemudian Kementerian Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Kementerian Badan BUMN dan termasuk Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Itu yang sudah kita coba dorong dan ada hampir sekitar 966 program kegiatan dari 25 kementerian/lembaga Pak tapi kalau Kementerian Kesehatan masuk kemudian Kominfo masuk untuk masalah koneksi internet dan lain-lainnya *insyaallah* mungkin akan bertambah lagi Bapak dan Ibu.

Selanjutnya, Bapak dan Ibu kami juga melaporkan juga atas penggunaan dana desa walaupun saat ini ini berada di ranahnya Ditjen PDT Pak, membangun desa dan pedesaan. Kami kalau lama melaporkan bahwa

}

Kementerian Desa sedang menerbitkan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa ya dan merupakan kewenangan Desa ya. Seperti perbaikan konsolidasi data SDGs dan macam-macam dan termasuk penumbuhan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dan termasuk mitigasi penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa yang merupakan kewenangan desa yang disebutkan oleh Bu Ning dari Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri.

Jadi Bapak dan Ibu itu hal-hal yang konkret yang sedang kami lakukan mengkoordinasikan karena Kalau kami kerjanya sendiri nggak akan mungkin pak, makanya kita butuh kerja bersama dan ini betul-betul bisa kita Kawal dalam sebuah Kepres RAN-PPDT 2024 yang akan datang.

Bapak dan Ibu ini pun tidak kita bicara di Kementerian pusat tapi jika dengan teman-teman Daerah Tertinggal dan teman-teman provinsi yang punya daerah tertinggal melalui belanja opininya pak. Mungkin Bapak dan Ibu hal-hal yang perlu kami laporkan mungkin dari sahabat kami dari Ditjen PEID bisa menambahkan pak?

Baik Bapak terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Rafdinal lanjut saja ke Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo.

Pak Wahyu, mana Pak Wahyu?

DIRJEN APLIKASI INFORMATIKA KOMINFO:

Selamat, Selamat pagi Bapak-Ibu Pimpinan Rapat, Selamat siang sudah masuk jam 12 lewat semangatnya tetap pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi X DPR,
Bapak-Ibu dari Anggota Komisi X juga,
Para Pimpinan Kementerian /Lembaga yang hadir pada pagi hari ini,

Mohon maaf deh mungkin kami tidak menyebut satu persatu.

Perkenalkan kami mewakili Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Pak Semi Pengharapan karena beliau juga pagi hari ini juga pagi siang hari ini membahas terkait juga Perubahan Undang-Undang ITE. Jadi pada waktu yang bersamaan mohon izin untuk menyampaikan sedikit apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo khususnya terkait dengan program literasi digital.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Next slide, saat ini kita berfokus pada menciptakan Indonesia sebagai *Digital Nation* di mana kita melihat selama pandemi yang lalu bagaimana kita sangat tertolong dengan berbagai solusi digital manakala kita tidak mungkin melakukan kegiatan secara *physical*. *Nah* upaya ini sudah berjalan selama 5 tahun ini. Namun demikian banyak hal yang masih harus kita lengkapi.

Bapak-Ibu sekalian memang kunci utama adalah penyiapan infrastruktur tapi ada tiga pilar utama yang harus dilengkapi yaitu; pemerintahan digital, masyarakat digital, serta ekonomi digital.

Teknologi dalam hal ini memang sebagai *enabler* dengan memanfaatkan teknologi informasi maka berbagai kemudahan dapat kita peroleh khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya terkait dengan literasi yang disampaikan pada hari ini maka Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan *next slide*, program nasional terkait dengan literasi digital, khusus terkait digital.

Kami memiliki amanah untuk melakukan literasi digital dengan tagline “Indonesia Makin Cakep Digital” sehingga masyarakat Indonesia paham bagaimana memanfaatkan menggunakan dan mendapatkan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi. Kami memiliki target sebanyak 50 juta masyarakat Indonesia diberikan program literasi digital bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, institusi pemerintah, pusat dan daerah.

Target kami untuk tahun ini adalah 5,5 juta masyarakat untuk diberikan literasi digital dengan 4 pilar yaitu; kecakapan digital (*digital skill*), *digital ethics*, *digital culture* dan *digital safety*.

Setiap aspek tentu memiliki tantangannya masing-masing, namun kita memecah sektor untuk pelaksanaannya kepada tiga segmen yaitu; segmen pendidikan, kami banyak berkolaborasi dengan Kemendikbudristek. Kemudian segmen Pemerintahan karena kami masuk ke setiap Kementerian lembaga pusat dan daerah termasuk TNI dan Polri. Kelompok terakhir adalah segmen kelompok masyarakat di sini mencakup kepada seluruh masyarakat, baik itu difabel terkait dengan gender perempuan, kemudian lansia, kelompok agama, komunitas kepemudaan wilayah 3T dan juga kepada komunitas-komunitas lainnya.

Yang perlu kami sampaikan bahwa *next slide*, tidak mudah dalam melakukan literasi digital kepada masyarakat kita, khususnya kepada mereka-mereka yang bukan *digital native*, kami berupaya untuk menekan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pencaanangan program literasi digital pada tanggal 20 Mei 2021. Yaitu untuk membanjiri ranah digital dengan konten-konten positif, kita ketahui begitu banyak dan negatif, sehingga diperlukan peran serta berbagai kelompok masyarakat dalam mengurangi dampak negatif dari digitalisasi.

Tidak hanya terkait dengan berita tapi juga terdapat konten-konten baik yang sifatnya *Cyber Crime* baik itu perjudian, penipuan, tidak kalah penting terdapat pelanggaran terhadap SARA, terorisme, bahkan perdagangan yang ilegal, bahkan ada konten yang meresahkan masyarakat dan juga kekerasan kepada anak-anak.

Bapak-Ibu sekalian kami, memiliki *slide* sebelumnya masih. Ya kami dengan 4 pilar *digital skill*, *digital culture* dan *digital ethics* serta *digital safety*. Kita mengharapkan agar kita dapat melakukan peningkatan kemampuan, baik itu kognitif dan afeksi masyarakat dalam menguasai teknologi digital dalam pilar ini tentu ini menyasar seluruh sektor baik masyarakat digital ekonomi dan juga pemerintahan.

Slide selanjutnya.

Nah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari program literasi digital kami mengukur dengan adanya indeks literasi digital yang sudah kami mulai ukur pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang lalu pada saat pelaksanaan program di akhir pelaksanaan program.

Memang ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan dari tahun 2021, 2022 dari 3,49 menjadi 3,54, namun yang perlu kami catat adalah nilai terendah terdapat pada *digital safety*. Jadi bagaimana masyarakat paham menghindari berbagai upaya kejahatan di dunia digital penipuan, walaupun sifatnya mungkin *social engineering* agar tidak terjebak pada hal-hal yang dapat merugikan setiap individu penggunaannya.

Kami melakukan sampling kepada seluruh dari masyarakat berjumlah 10.000 responden setiap tahun dan tahun ini adalah tahun yang ketiga.

Bapak-Ibu sekalian.

Tentunya literasi digital merupakan bagian dari literasi secara keseluruhan yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu dari Kementerian lembaga sebelumnya dan kami di *next slide* memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari konten-konten digital. Bagaimana menghindari, bagaimana kita mempertahankan budaya kita, bahkan juga etika di dalam dunia digital.

Seluruhnya dapat diakses melalui portal kami yang sifatnya terbuka untuk umum dalam literasi digital.id dan kami memiliki berbagai kegiatan yang bisa diikuti masyarakat melalui event.literasidigital. Tidak kalah penting kami juga menyediakan berbagai kanal melalui *platform* digital, baik di sosial media seperti Instagram, TikTok demikian juga di YouTube.

Demikian Bapak Pimpinan Rapat yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Wahyu dan lanjut saja kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Pak Subagja ya.

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PAN RB (PERWAKILAN):

Terima kasih.

Pak Pimpinan Pak Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat, Bapak-Ibu, Pimpinan jabatan tinggi Madya dan Pratama dari unsur pemerintah yang sudah hadir, Rekan-rekan teman-teman sekalian,

Nah pertama-tama terima kasih izin Pak deputi tidak bisa hadir kebetulan pada saat yang sama kami juga sedang merevisi Undang-Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, izin Pimpinan untuk mewakili beliau.

Yang pertama barangkali kami akan bicara kaitan dengan bagaimana sumber daya manusia pendukung untuk literasi termasuk untuk bagaimana mengoptimalkan peran perpustakaan dan di sini kami laporkan Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian.

Jadi yang pertama ada SDM yang disebut dengan jabatan Pimpinan tinggi baik, Madya maupun Pratama dari unsur perpustakaan, baik di Perpustakaan Nasional maupun di dinas-dinas Pak.

Yang kedua adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ada administrator dan pengawas dan terakhir adalah ada jabatan fungsional.

Nah dalam hal ini Kemenpan sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah melembagakan pengelola jabatan pengelola perpustakaan, apa yang disebut dengan jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Pustakawan Pak. Sehingga jabatan fungsional Pustakawan ini karena sudah dilembagakan menjadi sebuah jabatan fungsional maka teman-teman yang berkarir dalam jabatan fungsional itu dia memiliki sistem karir. Sistem karirnya apa, dia memiliki jenjang jabatan dan untuk Pustakawan ini memang dari awal kita sudah menetapkan jenjang jabatannya dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi. Jadi artinya dari mulai pertama kalau dia kategori keahlian sampai dengan jenjang tertinggi di Pustakawan Ahli Utama termasuk juga untuk asistennya yang merupakan kategori keterampilan.

Nah, kemudian dari situ bukan hanya standar karirnya yang sudah ditetapkan tapi juga standar kesejahteraannya Pak. Jadi kami juga sudah menetapkan Perpres melalui Peraturan Presiden terkait dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan sehingga jabatan ini memang sudah memiliki tadi tunjangan fungsionalnya dan juga menteri PANRB telah menetapkan kelas

}

jabatannya Pak jadi kelas jabatannya itu terendah 8 sampai dengan 13, sehingga kalau dari sisi kesejahteraan Pustakawan ini sudah memiliki apa harga jabatan, tadi baik dari sisi gaji tunjangan maupun kelas jabatannya.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, izin bertanya, ada belum ini ya ada bahannya ya Pak?

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB:

Iya Pak, tadi kami kebetulan disposisinya baru menjelang ini tapi kalau dikasih *share screen* untuk dibuka, coba kami tayangkan

KETUA RAPAT:

Nanti sisipkan ya Pak ya.

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB:

Iya, nanti kalau di apa coba masuk ke ini Pak, ke *zoom meeting*-nya

KETUA RAPAT:

Oh ke *zoom meeting*, boleh. Makasih

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB:

Izin, Pak.

KETUA RAPAT:

Eh, udah dijadikan *host* atau *co-host*. Sudah pak tinggal bisa di *share screen*.

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PANRB:

Baik Pak, izin Pak,

Mohon maaf agak lambat.

Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, tadi adalah SDM pendukung untuk perpustakaan jadi secara kelembagaan memang tadi sudah dilembagakan, baik dari sisi jabatan karier maupun dari aspek kesejahteraannya. Cuma memang pustakawan ini belum ada perbaikan Pak untuk tunjangan fungsionalnya dia sudah ada, tapi memang belum menyesuaikan dengan yang baru termasuk kelas jabatannya.

Jadi kalau yang tertinggi sekarang sudah 14 Pustakawan ini masih 13 mungkin dari Perpustakaan Nasional perlu didorong Pak, supaya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih untuk teman-teman Pustakawan

dengan mengusulkan peningkatan kelas jabatannya, jadi dengan kelas jabatan yang dinaikkan, berarti dia akan memiliki juga penghasilan yang lebih tinggi.

Nah, kebetulan juga Pustakawan juga ini jabatan yang memang bukan hanya diisi bisa diisi oleh PNS tapi juga bisa diisi oleh PPPK oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sehingga perekrutan untuk Pustakawan itu nanti bisa akan lebih mudah. Cuma memang dari aspek kebijakan tadi usulan jarang sekali Pemerintah Daerah itu mengusulkan Jabatan Fungsional Pustakawan Pak.

Jadi, tahun 2022 saja dari formasi yang disiapkan kita 900 ribuan itu hanya 500 ribuan yang mengusulkan ke kita secara nasional untuk seluruh jabatan. Jadi memang secara komposisi padahal kita sudah menyiapkan bahwa lebih dari 50% jabatan-jabatan di pemerintahan itu fokusnya adalah ke jabatan-jabatan fungsional.

Ya, apalagi setelah ada arahan Bapak Presiden untuk mentransformasi jabatan-jabatan Eselon III ke dalam jabatan-jabatan fungsional, dari sisi kebijakan pengangkatan juga dari tahun 2005 kita juga sudah melakukan pengangkatan satu juta lebih temen-temen tenaga honorer gitu ya untuk menjadi PNS pada saat itu. Namun setelah adanya Undang-Undang 5 2014 ini tidak bisa lagi diangkat secara otomatis karena bisnisnya meritokrasi mereka harus bersaing ya harus kompetitif dan sebagainya.

Nah kemudian, ini hasil pendataan kami.

Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.

Bahwa pendataan kita yang kemarin itu sudah ada 2,3 juta tenaga non ASN yang didata sehingga memang ini juga menjadi PR. Satu sisi mereka itu punya kontribusi satu sisi juga beberapa daerah juga tidak mampu untuk membayar secara penuh dia sebagai PPPK. Sekarang kami sedang merumuskan kira-kira rumus yang tepat untuk bisa tetap mengakomodir mereka sehingga diupayakan tidak ada PHK masal ya, tidak ada pembengkakan anggaran dan juga tidak mengurangi pendapatan mereka saat ini.

Kemudian yang terakhir adalah harus ada regulasi yang bisa memayungi sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. *Nah* oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, sekarang ini muncul usulan-usulan untuk mengangkat sisa THK2 dengan tenaga-tenaga non ASN tadi. Ya, namun yang paling penting adalah dalam sistem meritokrasinya, mereka tetap diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk bisa berkompetisi menjadi ASN tentunya dengan catatan ada beberapa afirmasi karena mereka sudah lebih dahulu bekerja gitu ya.

Kemudian, kebijakan kita ini sebagai contoh saja Bapak-Ibu sekalian bahwa di tahun sebelumnya kita juga sudah merekrut di tahun 2022 itu, tapi tingkat keterisiannya itu cukup rendah, Pak Pimpinan, jadi hanya 46% ya.

Nah, sekarang ini muncul usulannya kita menurunkan *passing grade* kami berpendapat kalau kita *passing grade* itu terus kita turunkan berarti kualitas pelamar semakin rendah. *Nah* ini juga mungkin evaluasi Pak kaitan dengan literasi, kenapa tingkat kelulusannya sangat rendah. Padahal beberapa jabatan kita turunkan 40% ya kalau kita sampai turunkan lagi 20% kita bisa bayangkan nanti kualitas ASN kita

Nah oleh sebab itu mungkin jadi evaluasi kita juga barangkali, apakah ada persoalan di barangkali ini Pak ya di aspek pendidikan dan sebagainya literasi membaca mereka dan sebagainya, sehingga tingkat kelulusannya sangat rendah sekali ya dan bahkan ada yang tingkat kelulusannya sampai dengan 12%, dosen juga sangat rendah Pak tingkat kelulusannya rendah sekali.

Nah oleh sebab itu, inilah yang menyebabkan teman-teman banyak yang apa namanya tidak bisa memenuhi kuotanya Pak ya, termasuk juga tadi apa Pustakawan dan sebagainya.

Nah terkait dengan itu, kita sering kali ketika apa menyelesaikan masalah solusinya itu nambah orang, Pak. Padahal kita eranya digital gitu ya,

Nah oleh sebab itu, salah satu kebijakan Kementerian PAN kita akan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital, ya termasuk juga barangkali Pustakawan Pak. Jadi artinya pemanfaatan digitalisasi ini saya kira juga menjadi penting dan untuk rekrutmen CPNS kita itu memang sekarang ini cukup selektif. Saat ini dilakukan untuk penegakan hukum Kejaksaan kemudian juga Hakim ya kemudian juga intelijen dan dosen pak itu yang dilakukan selektif untuk CPNS tahun ini.

Nah, tahun ini aja kami menyiapkan 1 juta 30 ribuan untuk formasi 2023, tapi apa yang terjadi ternyata memang tidak secara keseluruhan diam bisa mengoptimalkan. Guru itu kami dengan Kemendikbud melakukan *coaching clinic* itu tambahannya mungkin hanya sekitar 22.000 Pak, jadi tidak secara optimal.

Nah, salah satu persoalannya itu adalah aspek anggaran Pak Pimpinan Jadi mereka tidak sanggup untuk membayar dengan standar mereka sebagai PPPK, padahal untuk guru dan nakes itu, kami betul-betul memberikan formasinya termasuk seleksinya afirmasi Pak. Jadi beberapa diperhitungkan jadi semuanya tetap melalui proses seleksi, tapi ada beberapa afirmasi yang kita perhitungkan pengalaman kita berikan bobot, sertifikat kita berikan bobot gitu ya,

Dan kita tidak bisa mengabdikan bahwa mereka itu harus tiba-tiba diangkat begitu, walaupun ada tuntutan keadilan dan sebagainya, tapi kami sampaikan bahwa keadilan itu bukan untuk tenaga honorer tapi untuk Warga Negara Indonesia.

Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ini kaitan dengan posisi saat ini yang Pustakawan Pak memang Pustakawan itu se-indonesia JF-nya itu kurang lebih yang Ahli Utamanya itu ada 52 Pak.

Padahal ini keterlibatan temen-temen Ahli Utama juga penting jadi bukan berarti bahwa ketika ahli utama karena dia jabatan keahlian terjemaknya tetap di kegiatan manajerial harusnya mereka pun di keahlian. Jadi karena dampak keuangannya juga luar biasa. Jadi Pak Menteri itu agak ngerem untuk ke ahli utama karena memang ini kecenderungan juga BOP-nya naik Pak ya dari 60 ke 65 tahun gitu ya.

Nah, sementara tadi dari aspek tugas fungsinya kadang-kadang mungkin harus kita evaluasi apakah dia masih mengelola di perpustakaan atau tidak apalagi nanti dibantu oleh digitalisasi dan sebagainya. Jadi saat ini kalau data kami menunjukkan bahwa ada kurang lebih tadi kalau dari jumlah yang dibutuhkan itu memang masih cukup jauh ya, tapi persoalannya saya kira bukan hanya persoalan di kuantitas, tapi di kualitas pembinaan juga aspek pendukung sistem kerja supaya dia bisa tetap optimal ya.

Nah kemudian, selaku instansi Pembina juga Seharusnya harus bisa mendorong itu, nah ini sebagai ilustrasi Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian, ini adalah formasi pustakawan tahun 2022 ya dari 138 instansi pemerintah itu formasinya itu 947 kemudian yang lulus itu hanya 610 Pak jadi 64%.

Nah saat ini, jumlah usulan Pak yang diusulkan oleh pusat dan daerah dari 399 instansi pemerintah itu hanya 1.326, ya seluruh kementerian/lembaga ya, jadi artinya termasuk juga di PTN. *Nah* oleh sebab itu menteri PANRB itu sekarang sudah menetapkan Permenpan 1 2023, Permenpan 1 2023 itu bisa melakukan perpindahan antar JF Pak. Termasuk kita kelebihan guru dia jadi Pustakawan atau jabatan lain dan sebagainya. Jadi ini juga penting supaya birokrasi kita lebih lincah dan lebih dinamis, sehingga orang itu bisa mendukung antara satu jabatan ke jabatan yang lain.

Nah berarti, nanti dari aspek kekurangan-kekurangan itu Pak Pimpinan salah satunya adalah tadi komitmen Pimpinan daerah juga nanti instansi pembina itu, Perpustakaan Nasional juga harus mendorong dan Perpustakaan Nasional harus memiliki *Grand Desain* tadi untuk pengelola perpustakaan termasuk petanya Pak. Dengan adanya digitalisasi tentunya harus juga berubah bukan hanya menghitung suatu Pustakawan harus ada 10 orang gitu. Saya kira kita juga tidak akan pernah optimal.

Barangkali itu, Pak Pimpinan beberapa hal yang kami laporkan. Mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Makasih, Pak Subagja.

Lanjut ke Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Kemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, yang dalam hal ini Bu Moli ya.

Silakan, Bu.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL KEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENKO PMK:**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu
Namo buddhaya
Salam kebajikan,
Rahayu,
Salam literasi,

Yang terhormat Ketua Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan PLTP Komisi X DPR, Bapak Doktor Haji Abdul Fikri Faqih M.M.,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi X DPR RI,
Yang terhormat Bapak-Ibu perwakilan dari Kementerian/Lembaga Kemendikbudristek kemudian,
Kemendagri,
Kemendas PDPT,
Kominfo,
Kemenpan RB,
Kemenaker,
BKN dan Bapak-Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu,

Pertama-tama, permohonan maaf saya sampaikan bahwa Bapak Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Kemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Bapak Didi Soehardi berhalangan hadir. Karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan dan salam dari Pak Didi untuk Pak Ketua serta Bapak-Ibu yang hadir di sini.

KETUA RAPAT :

Salam ke Ferdi mestinya Pak Didi tadi.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL KEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENKO PMK:**

Izinkan saya mewakili Beliau untuk memberikan presentasi terkait dengan literasi.

Perkenalkan saya melalui Moli Prabawati, Asisten Deputi Literasi Inovasi dan Kreativitas, Kemenko PMK yang pada hari ini didampingi oleh teman saya, Mas Tri Haryanto selaku Koordinator Pemuda dan Literasi Kemenko PMK.

}

Terima kasih undangannya Komisi X. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya saya pernah mendampingi Ibu Pangesti Widarti ya.

Baik langsung saja ke paparannya. Ini adalah gambaran indikator literasi Indonesia, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketua ya, bahwa baik dari indikator secara global maupun nasional ini, Indonesia dapat disimpulkan literasinya masih rendah atau kurang. Meskipun indeks pembangunan literasi masyarakat di tahun 2022 ini, menyatakan bahwa kita sudah masuk dalam kategori sedang atau nilainya 64,48%.

Next slide, nah ini adalah penyediaan akses literasi masyarakat presentasi perpustakaan desa dan komunitas terhadap jumlah desa, jadi desa yang ada sekitar 84.096 desa. *Nah* baru ada sekitar 25.960 perpustakaan desa. Kemudian untuk perpustakaan komunitas itu baru ada 5327 atau 6%.

Lalu, untuk ketersediaan bahan bacaan dan SDM-nya jumlah koleksi perpustakaan tahun 2022 mencapai 26.761.152 atau tingkat ketercukupan hanya 0,0495 berdasarkan standar IFLA/UNESCO, *nah* mereka mengharapkan adanya dua kali jumlah penduduk jadi bisa dibayangkan bahwa ketersediaan bahan bacaan masih 26 jutaan. Padahal masyarakat kita ini jumlahnya populasinya 270 juta penduduk sehingga harusnya kita punya 540 juta ketersediaan bahan bacaan.

Lalu, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan 2022 sebesar 1:17.978 padahal standar dari IFLA/UNESCO itu mengharapkan satu dibanding 2.500.

Kemudian, bicara tentang akses internet masih terdapatnya *blank spot* merupakan kendala tersendiri dalam pengembangan literasi digital masyarakat masih terdapat 5.158 desa atau kelurahan atau sekitar 6,13% tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 desa atau kelurahan atau sebesar 9,75% tidak memiliki akses internet.

Nah, next slide program pemberdayaan literasi, jadi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kami dari Kemenko PMK memang sudah melakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan peningkatan literasi dan bahwa program literasi ini yang sebetulnya ada di hampir semua Kementerian/Lembaga contohnya di Perpusnas, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, Kementerian teknis lainnya, Pemda, Akademisi Media Masyarakat, namun memang masih perlu ditingkatkan Sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Next slide. Kami mencoba membuat bagan sinergi lintas pemangku kepentingan pada Peta Jalan Pembudayaan Literasi atau PJPL tentu kami berharap di pemerintah pusat ini adanya koordinasi kolaborasi sinergitas, gimana caranya untuk mewujudkan masyarakat yang literatur atau berpengetahuan dan masih berharap bahwa di sini ada Kemendikbudristek dan Perpusnas sebagai ujung tombaknya. Juga dukungan dari Kementerian/Lembaga lain termasuk dukungan dunia pendidikan dan akademisi, dunia usaha dan dunia industri, komunitas dan media.

Untuk itu, perlu payung hukum yang kuat yang menaungi Sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Adapun untuk di daerahnya seujung tombak pelaksanaan PJPL adalah daerah perlu Sinergi Lintas pemangku kepentingan di daerah. Pemda, media, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri, komunitas, ini perlu adanya kolaborasi sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah yang memayungi Sinergi unsur Pentahelix tersebut.

Kemudian, terkait dengan penyusunan Peta Jalan Pemuda Literasi bahwa kesepakatan penyusunan Peta Jalan Pemuda Literasi atau PJPL secara bersama-sama diperoleh pada rapat pembudayaan literasi secara daring pada tanggal 25 Februari 2021 yang dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, Bappenas, Setkab dan BPS.

Selanjutnya, kami melaksanakan Raker pembahasan PJPL sebanyak 5 kali tanggal 20 Mei 2021, 18-20 November 2021, 30 November 2021, 4 Maret 2022 serta 30 Juni 2022 yang telah melibatkan 35 perwakilan dari Kemendikbudristek, Perpustakaan, Kemenag, Setkab, Setneg, Kemendagri, KemendesPDPT, Kemenkominfo, Kemenkeu, KemenPPPA, Kemenkes, Kemensos, Kemendag, Kemenperin, Kemenhub, KemenkopUKM, Kemenparekraf, KLHK, KKPP, Bappenas, Wantanas, BRIN, Badan POM, BPS, BNN, Polri, Balai Pustaka, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Forum Perpustakaan Sekolah, GLN, Gareulis Jabar, SLBN 5 Jakarta GPMB, Bupati Magetan, para penulis dan Kemenko PMK.

Nah, penyusunan naskah akademik peta Jalan Pemuda Literasi dibantu oleh 4 tenaga ahli yaitu ibu Pangesti Widarti dari UNY kemudian Pak Agus Triyanto dari Universitas Bengkulu, Pak Nurradi GPMB dan Ibu Heni forum Taman Baca Masyarakat. Berdasarkan kesepakatan lintas Kementerian lembaga tersebut perlu disusun sebuah Peraturan Presiden sebagai payung hukum PJPL dimaksud. *Nah* melalui surat nomor S55/PMK/3/2022 Menko PMK meminta Mendikbud Ristek untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pembudayaan Literasi.

Kenapa kami meminta Kemendikbudristek karena memang sebagai kementerian teknisnya juga mempunyai tadi kewenangan dan fasilitas tentunya terkait dengan peningkatan literasi.

Nah, pengusulan Peraturan Presiden tersebut mengalami kendala mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembukuan pada Bab 13 Pasal 74 dan seterusnya itu telah mengatur pengembangan budaya literasi. Namun kami berharap literasinya itu karena di sini masih membahas yang secara tidak detail, kami berharap literasi ini lebih luas cakupannya daripada sistem perbukuan dimaksud.

Nah, literasi saat ini perlu dipahami tidak hanya terkait kegemaran membaca, namun bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup masyarakat.

UNESCO tahun 2015 mendefinisikan literasi sebagai upaya menginternalisasikan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan berbagai media teks/tulis atau lisan audio/visual pada berbagai konteks dengan memperhatikan komunitas atau masyarakat beserta nilai-nilai luhur di dalamnya secara santun dan bijak untuk mencapai tujuan.

Perpusnas mendefinisikan 5 tingkatan literasi dari mulai tingkat 1 baca tulis hitung dan pembentukan mental karakter religius sampai dengan tingkat 5 memiliki kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global menjadi produsen bukan konsumen.

Bidang literasi tentu berkembang tidak hanya 6 literasi dasar baca tulis, numerasi, sains, digital finansial, budaya, Kewargaan namun merambah bidang lainnya seperti literasi media dan keamanan *cyber*, literasi kriminalitas, literasi kebencanaan, literasi keselamatan jalan raya, literasi pertanian dan lain-lain.

Sehingga cakupan literasi tidak saja hanya terkait sistem perbukuan namun juga terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses internet, peningkatan kesadaran masyarakat, serta bagaimana sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi.

Oleh sebab itu, diperlukan Undang-Undang tentang Literasi, baik melalui mekanisme inisiatif baru maupun melalui perluasan cakupan undang-undang yang telah ada melalui revisi.

Next slide, nah kemudian, perlu kami informasikan terkait dengan KSP literasi oleh Kemenko PMK koordinasi sinkronisasi dan pengendalian terkait peningkatan pembudayaan literasi, baru dilaksanakan sejak tahun 2021 setelah pembudayaan literasi masuk dalam prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 serta terbentuknya unit kerja baru Asdep Literasi Inovasi Dan Kreativitas. Jadi kami ini unit kerja baru baru di akhir tahun 2020 ada Asdep Literasi Inovasi Dan Kreativitas di Kemenko PMK.

Nah, KSP terhadap peningkatan budaya literasi dilaksanakan oleh pejabat setingkat Eselon II serta didukung hanya oleh tiga staf; satu koordinator, satu sub koordinator dan satu pelaksana.

Nah, dukungan anggaran KSP untuk 1 tahun di kami itu hanya sebesar 500 juta jadi kalau tadi pak ketua bilang perpustakaan punya anggaran 700 miliar, kami hanya punya anggaran 500 juta setahun yang juga digunakan untuk KSP pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia serta bahasa sastra dan aksara daerah.

Namun, meskipun kami anggarannya sangat kecil hasil capaian KSP di tahun 2021 sampai 2023 kami telah menyelesaikan, pertama naskah akademik peta jalan, kemudian literasi pada tahun 2021 dan kami sudah serahkan kepada Komisi X. Kemudian kedua Digitalisasi aksara Jawa Sunda Bali Tahun 2022, ketiga digitalisasi aksara Pegon dan Kawi tahun 2003.

Kemudian saat ini, kami membangun aplikasi Ruang Digital Keluarga untuk mendukung literasi digital anak di tahun 2023 dan juga kami telah melakukan berbagai kegiatan Sinergi Peningkatan Literasi Inovasi Dan Kreativitas di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sumba Barat serta Kabupaten Sumba Timur.

Demikian, Pak Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi X yang kami sampaikan. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam literasi!

KETUA RAPAT:

Salam literasi!

Bapak-Ibu yang saya hormati.

ini waktunya habis sehingga kita perlu memperpanjang sampai jam berapa ini supaya, sampai setengah dua dulu ya sampai jam 13.30, ya

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

silakan ada masih ada satu lagi dari PKN Deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian.

Pak Ahmad Sauqi silakan.

PKN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN:

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

Yang saya hormati Pimpinan sidang,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Ketua Anggota Komisi X DPR RI,
Yang saya hormati Bapak-Ibu perwakilan kementerian/lembaga,
Yang saya hormati Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Izin Pimpinan sedianya Pak Deputi akan hadir dalam forum rapat ini namun ada tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan sehingga beliau menugaskan kami. Sedianya juga ada direktur teknis yang menangani tentang jabatan fungsional yaitu direktur jabatan ASN yang termasuk juga menangani jabatan fungsional pustakawan, namun direkturnya lagi cuti pada hari ini sehingga kami juga akan mewakili.

Bapak-Ibu yang saya hormati,
Pimpinan.

Prinsipnya apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari Kementerian PAN dan RB kami sependapat dan mendukung sepenuhnya karena dalam Undang-Undang ASN juga kebijakan umum pengelolaan manajemen ASN itu berada di kewenangan PAN dan RB. Sementara kami penetapan teknis yaitu dalam teknis yaitu penetapan norma standar prosedur di bidang Manajemen Kepegawaian. Ada tiga hal yang kami utarakan dalam rapat ini yaitu dalam surat, pertama kebijakan ASN terkait Jabatan Fungsional Pustakawan ini sudah ada norma aturan yang mengatur yaitu ada Permen PANRB Nomor 55 Tahun 2022.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, ini juga nggak ada bahannya, ya Pak ya. Yang yang dikirim ke Komisi X belum ada atau.

PKN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN:

Belum Pak, karena dadakan tadi Pak. Kami mewakili direktorat teknis yang berhalangan. Nanti menyusul.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau ada menyusul iya, termasuk ini Kemenpan RB tadi Pak kalo sudah ya.

Lanjut, ini PKN.

PKN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN:

Ya baik, kami lanjut, Pak.

Secara teknis kebijakan ASN terkait jabatan fungsional pustakawan itu telah diatur dengan Permenpan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

Di samping itu, terdapat dua peraturan PAN&RB Nomor 1 Tahun 2023 tadi sudah dijelaskan tentang jabatan fungsional dan secara teknis PKN telah mengeluarkan peraturan normal standar prosedurnya dengan peraturan PKN nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian.

Selanjutnya, untuk melaksanakan 7 amanat yang didelegasikan dalam Permenpan 1 tahun 2023 PKN juga telah menyusun Rancangan Peraturan PKN Tentang Tenaga Kredit Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional.

}

Selanjutnya, dalam surat juga ada disebutkan peta kebutuhan jabatan fungsional Pustakawan jika kita membaca Perban 11 Tahun 2022 ada tugas instansi Pembina yang diutarakan dalam Pasal 45 yaitu, pertama penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional, kedua penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional, untuk itu penguatannya ada di kementerian teknis pembinanya itu kementerian atau yang perpustakaan.

Oleh karenanya, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian dan keterampilan melalui pengangkatan pertama perpindahan jabatan atau penyesuaian *inpassing* dan promosi ini strategis memang harus diatur sebaik-baiknya dan secara teknis juga telah diamanatkan dalam Perban 11 Tahun 2022 adalah menjadi tugas instansi pembina.

Selanjutnya yang ketiga, bagaimana ngetren kebutuhan pustakawan di K/L maupun di daerah untuk kebutuhannya dalam Perban secara teknis juga kami sudah utarakan. Yaitu di Pasal 2 bahwa penetapan kebutuhan PNS dan jabatan fungsional dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan jabatan fungsional, serta ditetapkan berdasarkan karakteristik jabatan fungsional dan organisasi serta disusun dalam pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional.

Oleh karenanya, instansi Pembina Pustakawan mungkin sebaiknya berkoordinasi juga dengan Kementerian PAN&RB karena telah dikeluarkannya peraturan PAN&RB tentang jabatan fungsional pustakawan.

Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan, Pimpinan. Sebagai pelengkap apa yang disampaikan tadi dari Kementerian PAN&RB.

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, pak Ahmad Saoqi.

Dan saya kira sudah semua dari narasumber ada yang belum hadir dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, ini juga terkait juga baik program maupun semua yang terkait SDM. Berarti KemenpanRB, PKN sudah nanti mesinnya adalah penguatan di Bappenas dan Kemenkeu karena kepastian tadi kan ada analisa dari KemenpanRB, ternyata daerah *enggak* mampu untuk membiayai APBD-nya untuk misalnya formasi PPPK, kenapa mereka tidak mengajukan.

Ini terkonfirmasi berarti beberapa hal termasuk dengan Panja lain. Yang mestinya juga diundang mestinya kalau dari Kemendikbud karena dikatakan ada SD SMP SMA beda-beda semuanya, memang Ditjen Paudasmen tentu harus di ini, harus di juga diajak diskusi. Kalau tentang personalia ketika karena

ada tidak hanya guru tapi tenaga kependidikan tadi kan kalau Pustakawan masuk ke tenaga pendidikan

Dan tadi ada apa tadi Ahli Utama atau apa yang Bapak juga yang dari Dirjen Dikti nampaknya juga harus ini karena sudah disetop kayanya dan kemarin permintaannya untuk dibuka kembali. Kemendagri ini saya kira semua ternyata bermuara di Kemendagri karena diatur dengan Permendagri setiap tahun, setiap tahun ini Ditjen Bangda atau BAKD Bu?

PEMERINTAH:

Izin, ada dua Direktorat Jenderal Pimpinan, jadi perencanaan pembangunannya dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah tapi keuangannya dari keuangan daerah.

KETUA RAPAT:

Berarti BAKD ini juga harus diundang mestinya, jadi Ditjen BAKD, karena nanti tadi misalnya PPPK nggak, mungkin kemudian di alokasikan kalau di apa namanya, tadi pedoman penyusunan APBD setiap tahun. Jadi, Permendagri itu setiap tahun keluar, setiap tahun keluar, tapi kalau kemudian tidak di *mention* di situ, ya *nggak* akan keluar nanti PPPK *nggak* akan terlalu keasikkan Kalau tidak ada perintahnya di Permendagri.

Nah, inilah yang makanya sangat kunci ini sebetulnya diurai seperti ini termasuk untuk literasi, nanti literasi meskipun di sini bunyi terus-terusan tapi kan alokasi anggaran dan sebagainya tidak diperintahkan oleh Permendagri setiap tahunnya, karena tahun 2023 berarti Permendagrinya tahun 2022 kalau 2024 berarti Permendagrinya tahun 2023.

Jadi, kalau *nggak* ada *mandatory* dari situ ya *nggak* bakalan ini kita berbuih-buih sekalipun *nggak* akan keluar karena 2024 dan *nggak* akan keluar, baik itu PPPK maupun yang lain. Saya kira ini di sini juga terkonfirmasi literasi digital itu ternyata di Kemenkominfo adanya Kemenkominfo bahkan diukur dengan Indeks Literasi Digital dengan 4 pilar dan seterusnya.

Kemudian, literasi ini juga serius sekali digarap oleh PDT cuman tadi menyarankan oleh direktornya, dirjennya apa tadi? PDP (Pembangunan Desa dan Pedesaan) ini yang perlu di jadi barangkali salah *address*-nya ini nanti kita akan ulang lagi supaya pembangunan desa dan pedesaan karena kalau ini hanya desa daerah tertinggal aja penekanannya di daerah tertinggal. Padahal kita tidak hanya yang tertinggal tapi semua desa mestinya karena Alokasi Dana Desa juga jadi.

Kemudian, bahkan ini ada Deputi baru ASN Deputi baru sudah tahun 2020 ya itu tertulis bahkan ASN Deputi literasi, jadi nyebutnya literasi sudah literasi inovasi dan kreativitas luar biasa. Jadi kan ini mestinya *nggak* bisa kemudian dipisah jadi literasi digital di Kemenkominfo. Kemudian ada ASN Deputi yang khusus menangani literasi bahkan peta jalan literasi dan

sebagainya dibuat semuanya kemarin ada 15 ya yang disampaikan oleh Bu Pangesti didampingi oleh Bu Moli itu juga.

Saya kira ini semakin terungkap semua hanya saya harus memberikan peluang kepada teman-teman di Komisi X.

Silakan, tadi yang sudah daftar lebih dulu Bang, Pak Rano Karno. Silakan.

F-PDIP (RANO KARNO S.IP):

Terima kasih, Bapak Ketua.

Bapak-Ibu sekalian.

Ini RDP yang terakhir nih dan saya agak bangga hari ini dari 10 undangan 9 datang. Karena apa waktu RDP yang pertama mungkin yang keempat ada satu kementerian yang *nggak* mau datang atau tidak boleh datang.

Sementara yang kita pikirkan, ini bukan sebuah kementerian tapi bangsa jadi saya sangat apresiasi sekali, karena tentu Panja ini tidak akan selesai pada periode ini pasti akan berlanjut.

Bapak-Ibu sekalian.

Panja ini dibentuk karena kegelisahan Komisi X pertama literasi Indonesia itu terendah di dunia berdasarkan PISA. Kemudian berdasarkan data Pustakawan di Indonesia itu hampir tidak ada lagi. Kebetulan mitra Komisi X ini cuma empat kemitraan, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga dan satu adalah Perpustakaan. Jadi, kita fokus di situ, ini bagaimana meningkatkan literasi, literasi bisa ditingkatkan dengan orang yang *expert* kategorinya Pustakawan, tapi ternyata Pustakawan sudah hampir habis. Namun masih dibutuhkan hampir 50.000/500.000 kalau berdasarkan dari Perpustakaan Nasional. Karena itulah Panja ini di bentuk Bapak-Bapak.

Tadi pada waktu semua paparan, dari setiap kementerian, saya agak pesimis, tapi begitu saya dengar MenpanRB, saya bilang mustinya Beliau pertama kali dia ngomong. Karena yang kita ingin tahu sebetulnya formasi ini ada tidak, karena dari sekian banyak PPPK, tidak ada formasi untuk pustakawan yang ada tenaga pengajar, kesehatan, pustakawan *nggak* ada. *Nah* sekarang, kita denger ternyata *enggak*. *Nah* berarti besok kita akan lebih fokus lagi nih bagaimana.

Kita sudah memanggil juga Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi apasih yang masih punya Prodi Perpustakaan ternyata masih banyak. Cuman mereka bilang, Pak bagaimana kita mau lulus, kita mau kerja di mana kalau ternyata perpustakaan juga tidak menerima kita. Buat apa mereka kuliah jauh-jauh jadi tukang insinyur kalo dia *enggak* kerja di insinyur istilahnya seperti itu.

Saya sekarang menjadi optimis tadi saya udah pesimis nih, maaf nih kalau Kementerian Pendidikan kita ketemu udah bahasanya seperti itulah aplikasi, aplikasi, aplikasi. Kita *nggak* butuh aplikasi kita butuh bagaimana ini menciptakan pustakawan, yang diperlukan, ada tenaganya cuman formasinya Menpannya belum dibuka, belum ada.

Bapak-Ibu sekalian.

Saya mungkin dalam tanda kutip mungkin orang baru di politik, tapi saya 10 tahun di pemerintahan. Sebelum saya jadi wakil bupati terakhir saya jadi Gubernur Banten. Saya tidak untuk berkampanye itunya, tapi disaat RDP lagi Pak semua kepala dinas, semua kepala dinas tidak semua Indonesia tapi mewakili Indonesia itu kita undang di sini.

Semua Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan mereka mengeluh, mereka *nggak* paham. Saya sadar bu, waktu mereka denger itu saya baru sadar oh ternyata waktu dulu jadi gubernur memang rekrutmennya salah karena hampir rata-rata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan itu adalah orang-orang buangan atau yang mau pensiun yang *nggak* paham sama sekali bagaimana mereka mengelola.

Nah ini ada Mendagri di sini, nanti kita benahin semua di sini agar apa? Bu, pada waktu saya di Banten saya masih inget bu, terakhir itu pustakawan itu tinggal 1 entar pensiun lagi. Abis itu kita mau cari Kepala Dinas Perpustakaan susahny setengah mati *enggak* ada dan *nggak* mau lagi.

Nah jadi pak ketua nanti begitu MenpanRB walaupun dia *nggak* siapkan materi buat kita saya lihat ada optimis. Oh berarti masih ada nih calon-calon sarjana perpustakaan yang bisa bekerja, tinggal sekarang kita lanjutkan formasinya Seperti apa saya *nggak* tahu tentang utama, tentang media, itu saya *nggak* tau yang pasti Bagaimana nih perpustakaan bisa dikelola oleh pustakawan. Untuk apa? Meningkatkan literasi, literasi sekarang bukan hanya baca menulis setiap kementerian punya filosofinya literasi masing-masing.

Nah, jadi barangkali Pak Ketua, ini saya menjadi optimis bahwa Panja nanti periodenya akan selesai nih minimal Kementerian Keuangan, Bappenas hadir nih. Supaya kita *nggak* setiap RDP *nggak* pernah selesai, saya minta maaf teman saya keluar karena apa yang dibicarakan kita udah selalu mendengar itu kita mau cari ini gimana caranya nih supaya ini literasi meningkat, Pustakawannya ada.

Nah, jadi *alhamdulillah* di akhir-akhir Panja kita ini, saya punya harapan bahwa dunia literasi di Indonesia akan berjalan pada *track* yang benar.

Terima kasih, Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalah warahmatullahi wabarakatuh

Lanjut, silakan Pak Andreas. Silakan.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman komisi X yang saya hormati,
Para narasumber dari berbagai instansi yang saya muliakan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastyastu
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka!

Mendengar merdeka, merdeka belajar lagi he..he.

Baik, saya punya pertanyaan dari tadi gitu dan bang Rano Karno udah menggebu-gebu menyampaikan satu pertanyaan yang menggelitik dan mendasar apakah literasi itu sama dengan perpustakaan begitu?

Nah ini yang saya kira tidak pasti tidak, tapi memang Bapak-bapak sekalian dan Ibu juga maaf, Ibu-ibu karena kami dari komisi X ini kegelisahan itu berawal dari teman-teman dari Perpustakaan Nasional itu yang menyampaikan tentang rendahnya literasi, kualitas tingkat literasi Indonesia.

Sementara sebelumnya itu tidak ada orang yang mempersoalkan dan juga termasuk kami di ini juga kan kaget juga gitu. Kemudian setelah itu ada presentasi dari PISA datang ke sini, karena semua orang menyadari bahwa pentingnya literasi ini gitu dan banyak ternyata juga banyak yang mengurus literasi ini gitu, tapi tidak kelihatan hasilnya ke mana gitu. Bahkan kalau kita lihat apa indeks ternyata banyak orang menyadari penting, banyak yang mengurus tapi hasilnya seperti itu, *nah* ini salahnya di mana begitu.

Saya kira hal pertama yang kita mungkin, ini kita perlu memahami bersama kembali apa sih sebenarnya literasi yang kita maksud. Jangan sampai kesalahan pemahaman ini membuat kesalahan kebijakan dan saya kira ini yang terjadi.

Seolah-olah kita melihat ini sebagai buku-buku yang ada di ini yang ada di apa di dalam gedung dan di dalam ruangan-ruangan begitu. Sementara kalau ditarik Ibu tadi menyampaikan definisi tentang literasi, saya kira tidak bukan itu. Perpustakaan ini hanya instrumen untuk mendukung kemampuan orang berpikir-berpikir kritis dan kemudian menyampaikan itu untuk hidup yang lebih baik gitu. Sehingga literasi itu menyangkut banyak aspek termasuk literasi

digital tadi gitu yang mau diurus oleh yang sedang diurus oleh Kementerian Kominfo.

Nah sehingga, saya kira ini mungkin perlu kita kembali kepada pemahaman kita bersama tentang makna daripada literasi ini itu, jangan sampai kemudian kita meneruskan kesalahan ini.

Saya ingat dulu ketika soal riset, riset juga terjadi di banyak-banyak orang menyadari riset itu penting dan di mana di semua lembaga ada Litbang. Baru kemudian setelah ya LIPI dan kemudian ada yang menyampaikan tentang pentingnya riset dan perlu adanya riset yang dikelola secara profesional secara benar baru kemudian dibentuklah BRIN itu sekarang yang sekarang ada.

Saya kira literasi ini juga jangan sampai terjadi seperti itu, *nah* kalau menurut saya ya mungkin bisa dikritisi juga betul atau tidak, kunci dari literasi itu dari pendidikan, sehingga *leading* sektor kembali harus pada Kementerian Pendidikan, Kemenristek. Kembali kepada pendidikan karena dasar daripada literasi itu ada di pendidikan kalau perlu ada di satu Dirjen khusus yang mengurus tentang literasi, tapi jangan tersebar di mana-mana terus kemudian tidak ada yang mengurus. *Nah* kita terlalu banyak bicara yang teknis tapi tidak bicara dari software daripada apa yang kita maksudkan dengan literasi ini.

Nah, itu satu hal yang saya kira ya mungkin dari sini teman-teman bapak-bapak juga menyampaikan pandangannya. Karena saya khawatir ini kita seolah-olah kita lihat hanya bahan-bahan ini tadi bahan-bahan perpustakaan. Sementara Perpustakaan mendukung Pendidikan, mendukung orang untuk memahami isi otak manusia. Karena literasi menyangkut isi otak manusia, dan saya kira tidak juga pada tempatnya Kominfo mengurus soal literasi digital gitu.

Kominfo berikanlah soal literasi, buatlah kurikulum tentang berikan masukan literasi digital masuk di dalam kurikulum pendidikan. Karena apa? Karena digital ini sudah merupakan bagian dari hidup manusia sekarang, setengah hidup kita kan di dunia maya setengahnya di dunia nyata begitu. *Nah*, kenapa kita tidak masuk di dalam kurikulum pendidikan sehingga itu menjadi bagian dari interaksi kehidupan kita gitu. Misalnya kalau kita anggap itu penting soal keuangan literasi keuangan, sehingga jangan sampai orang terjebak di dalam apa *Fintech* dan yang lain-lain kan banyak sekali gitu, kemudian soal *bully-membully* hari-hari ini gitu.

Nah, hal yang sebenarnya bagian adalah bagian daripada proses pendidikan seorang anak manusia dari kecil sampai besar menjadi dewasa dan terbentuk secara berpikirnya tentang bagaimana menghadapi hidup ini. Rasanya saya kira Pak Ketua pendefinisian dan pemahaman kita bersama tentang literasi dan bagaimana kebijakan tentang literasi dan turunan daripada Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap literasi ini penting. Artinya bertanggung jawab dalam hal ini negara melalui instansinya yang bertanggung jawab itu penting sehingga jangan sampai semua mengurus tapi tidak ada yang terurus, dan itu yang terjadi.

Tadi kan Ibu, sebenarnya mau melakukan oto kritik itu dari PMK melakukan oto kritik terhadap kita sendiri diri kita sendiri dengan 500 juta kami coba mengurusinya itu. Ini kan sebenarnya kok kalian yang banyak-banyak ini bicara banyak ini tetapi tidak ada yang ngerti tidak ada yang terurus gitu. Saya kira pesan dari ibu tadi setiap penting untuk kita pahami bersama dan kemudian ya dari Panja ini menghasilkan sesuatu yang, jangan sampai membuat kesalahpahaman keberlanjutan kesalahpahaman tentang literasi ini.

Kemudian, ini agak di luar ini tapi berkaitan dengan literasi digital Pak Kementerian Kominfo. Saya kemarin baru pulang dari daerah di daerah saya tuh di daerah pemilihan saya di Flores Pak. Itu berkaitan dengan digital kita bilang digitalisasi digitalisasi 3-4 tahun lalu udah banyak yang ngurus, banyak dipasang fiset-fiset, BTS-BTS baru sekarang banyak fiset-fiset tuh dicabut, dicabut kembali oleh Kementerian Kominfo diganti vendor yang baru tapi vendor yang baru tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi sebelumnya

Jadi, ada banyak keluhan di sekolah-sekolah dari fiset yang dulu yang dipasang kemudian dicabut, di puskesmas dulu yang kita pasang dicabut terus kemudian tidak diganti lagi karena katanya vendornya ganti. *Nah* ini mohon menjadi perhatian karena hal-hal ini kita ngomong digital tapi kalo tidak ada sinyal tidak ada gunanya juga. Ngomong digital-digital tapi orang harus naik pohon naik ke gunung tiang sinyal, ya sama aja gitu kita kembali ke zaman batu lagi nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Lanjut ke Sodik Mudjahid.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc) :

Makasih, Pimpinan yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan,
Rekan-rekan Komisi, dan
Para Mitra yang luar biasa.

Terima kasih atas paparannya yang komperhensif, luar biasa bahkan *complicated*.

Sebetulnya kenapa kita tidak melihat lebih fokus saja tadi Kemendikbud memberikan dua hal. Satu aspek peta Jalan Pemuda Jalan Literasi, bagus saya melihat paparannya juga tidak begitu nyambung dengan aspek peta Jalan Pembudayaan Literasi ini. Mereka untuk coba melihat dirinya aspek peta Jalan

Pembudayaan literasi, apakah yang kita paparkan dan kita kerjakan sudah nyambung atau tidak.

Kata Kemendikbud ada tiga. Satu aksesibilitas, yang kedua budaya, yang ketiga kompetensi untuk pembudayaan literasi itu. Apa itu aksesibilitas? Dua kok sederhana, ketersediaan fasilitas dan bahan bacaan ya kan?

Kemudian Budaya apa? Katakan Kemendikbud budaya dua kok, hanya pembiasaan aktifitas. Kompetensi apa? Katakan Kemendikbud meliputi tiga kok, satu kemampuan menemukan informasi, yang kedua kemampuan menafsirkan dan mengintegrasikan, yang ketiga ketika mengevaluasi dan merefleksi.

Sederhana kok sebetulnya literasi itu. Sementara paparan bapak-bapak luar biasa canggihnya *complicated*, kompleks, komperhensif bahkan kadang-kadang jadinya tidak nyambung gitu Pak. Itu maka kepada Ibu Menko Bu, mari kita fokus saja ke sana mungkin ditambah Pak satu digitalisasi difokuskan ke sana.

Jika kita fokus kepada peta Jalan Pembudayaan digitalisasi ini saya kira waktu tidak akan terlalu lama agar kita mengejar ketertinggalan literasi ini, apa saja yang tadi Pak? Satu koordinasi, yang kedua fokusnya, boleh yang ketiga tambah dengan anggarannya.

Terakhir pak, saya singkat saja Pak, apakah ada riset-riset tidak pak secara serius Bapak-Ibu apakah ada riset secara serius tidak? Mengapa kita tertinggal indikator literasi itu dan mengapa negara-negara itu maju begitu? Ya, jika kita punya jawaban yang akurat hasil riset tentang, "mengapa kita tertinggal dan mereka maju" ditambah dengan tadi peta jalan digitalisasi. Saya kira pekerjaan kita akan lebih fokus akan lebih sederhana akan lebih *simple* termasuk tadi Pak soal digitalisasi dan yang kedua pembudayaan pembudayaan di level keluarga.

Saya terngiang pak apa yang disampaikan ketua Komisi X Pak Saiful Huda di Indonesia Pak ini literasi Alquran itu bagus gitu Pak, tapi ada pertanyaan kenapa literasi Alqurannya bagus tapi tidak nyambung dengan literasi non-Alquran, nih contoh lagi yaa pak.

Saya beri contoh lagi Pak, bagi kita beragama Islam itu ajaran pertamanya *iqro* baca, baca, baca, tapi sampai sejauh mana pembudayaan nilai-nilai baca itu dalam agama itu dilaksanakan dengan baik oleh keluarga dan sekolah sehingga kita tidak lagi jadi tertinggal begitu.

Saya melihat ada ruang-ruang yang luar biasa, ada nilai-nilai yang luar biasa, ada budaya-budaya yang luar biasa, tapi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Orang suka bangga dengan budaya Yahudi apa katanya anak-anak itu begitu lahir di bukannya diberi madu dan suruh menjilatnya menciumnya begitu kan Pak? Sementara di budaya-budaya kita ada tapi saya kira ini belum kita maksimal kan pendayagunaan padahal kata Kemendikbud tadi peta jalan digitalisasi itu yang kedua adalah soal budaya.

Begitu, Pimpinan. Jadi, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Bisa melihat tadi belum fokus atas rujukan Peta Jalan Budaya Digitalisasi marilah kita fokus ke sana. Pertama satu Pak nomor 2 soal digitalisasi, yang kedua adalah penguatan budaya yang di Indonesia tetap dengan agama-agama kita memberikan penguatan budaya yang luar biasa.

Terima kasih pimpinan, dan saya mohon izin, Pak ada panggilan dari Pimpinan, ada Pimpinan tiba jawabannya dan ada temen kami dari Gerindra, Profesor Djohar untuk memberikan apa yang bagian dari pertanyaan saya atau komentar saya.

Terima kasih, saya Sodik Mudjahid, Fraksi Gerindra mewakili Jabar 1 Pak, kota Bandung, kota Cimahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf, ini karena waktunya habis jadi kita perpanjang lagi, sampai jam 14 .00 ya.

(RAPAT : SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Lanjut, Pak Djohar.

Silakan, Prof.

F-P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Saya telat masuk, dahulukan saja yang hadir duluan.

KETUA RAPAT:

Oh yang lebih dulu, tadi yang dafar anu, Bu Dewi Coryati.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Nggak papa, kami serahkan.

KETUA RAPAT:

Silakan, saya serahkan pada prof.

F-P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Baik, terima kasih pimpinan.

}

Seluruh tamu yang berbahagia.

Maafkan tadi terlambat dari pesawat dari Medan saya, hampir terbang ke Kuala Lumpur dulu.

Baik, masalah literasi ini memang semangat kita mengangkat semangat belajar-belajar kita untuk ikut senang membaca ya. *Nah* kita sudah tahu ranking kita di dunia ini ya sangat tidak bagus, dan saya sudah munculkan rapat secara resmi di sini kita *nggak* usah ikut-ikutan PISA lah, bikin standar sendiri, bikin standar sendiri, bagaimana membangun bangsa ini dengan standar kita. *Nggak* ada untung *nggak* ada ruginya Pak bikin itu, tapi ya kita masih tertahan di PISA, sekarang kita dapatkan data-data yang sangat menyakitkan bagi kita.

Nah pada saat merilis indeks modal manusia atau menyikapi index pada tahun 2020 sebelum pandemi itu World Bank mengolah data pendidikan Indonesia dan Learning Adjusted Years of Schools disimpulkan bahwa meski sudah sekolah sampai SMA kelas 2, namun kompetensi setara SD kelas 6. Begitulah pernyataan dari World Bank tentang pendidikan kita meski sudah SMA kelas 2, tapi pengetahuannya kompetensinya sama SD kelas 6. Jadi 4 tahun ini ada *learning loss*, ini bukan kita yang ngomong tapi Bank Dunia.

Beberapa waktu yang lalu Bank Dunia menggegerkan dunia Kembali jagad Pendidikan kita di Indonesia ini, yang mengatakan sejak pandemi Indonesia kehilangan atau *loss* lagi lagi 11 bulan. Jadi jika digabungkan dengan data World Bank, saya simpulkan bahwa nanti setara lulusan SMA SMK itu sama dengan lulusan SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Jika data yang dari *World Bank* ini kita mau pakai. "*Enggak* lah, *enggak* sampai begitu mana mungkin", kita kan sudah ada resepnya, Apa resepnya? Ya Merdeka Belajar kemudian seperti yang sekarang sedang populer kan? Membangun SDM unggul ... (Suara terputus 2:47:30) hasil dari pendapat pendapat atau kajian mereka.

Jadi terus terang kita memang mengerikan ini bukan tugas dari Kementerian Pendidikan saja itu tugas kita semua, bagaimana mengangkat harkat bangsa ini dari pendidikan. Jadi jangan merasa udah kami sudah siapkan kok udah ada episode-episodenya sudah 27 berapa episode mengatasi ternyata data yang didapat dari World Bank ini sangat-sangat memilukan hati kita bahwa lulusan SMA kita kompetensinya sama dengan lulusan SD atau MI.

Inilah pendapat dunia, jadi mengerikan jadi kita harus kerja keras semua jangan merasa itu tugas kami. Jadi tugas kita bersama bagaimana membangun bangsa ini dengan jalur yang benar. Jadi jangan yang salah-salah terus ya maunya bisa di beritahu karena seperti saya katakan kalau sudah menteri membuat jembatan bikin rumah salah bisa diperbaiki tapi membangun pendidikan jika salah bangsa ini yang rusak. Jadi, harus hati-hati, jangan semauanya *dewe*.

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

}

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut, Bu Dewi.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Baik pimpinan, terima kasih yang sebesar-besarnya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Perkenalkan saya Dewi Kurniati dari Fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Bengkulu. Saya sangat mengapresiasi atas pemaparannya dari semua pihak dari pemaparan ini, kami menjadi lebih berbahagia, karena ternyata banyak pihak yang fokus ataupun mendukung soal kata kunci literasi. *Nah* yang menjadi masalah tetapi indeks literasi kita ternyata rendah. Jadi saya tidak tahu, apakah ini karena belum ada fungsi kolaborasi sinergitas dari di antara K/L di antara kementerian atau seperti apa? Karena kemarin juga kita sudah rapat juga diantara ikatan perpustakaan asosiasi dan sebagainya ada tujuh organisasi soal perpustakaan dan satu soal Pustakawan, itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap literasi di Indonesia.

Saudaraku yang berbahagia, saya juga dalam hal ini sudah mengapresiasi bahwa Kemendikbudristek RI, sudah melakukan kerja-kerja dalam rangka mendorong peningkatan literasi ini. Sudah ada seperti Bimtek untuk guru distribusi bantuan buku bacaan, distribusi alat TIK dan lain-lain.

Nah kami juga ingin merujuk kepada paparan Badan Bahasa barusan di halaman 23 disebut ada tiga aspek peta jalan pembudayaan literasi. Saya yakin bahwa aspek aksesibilitas sudah berjalan dengan baik dan kami juga merasakannya itu juga. Namun bicara mengenai upaya peningkatan literasi, tidak hanya bicara tentang berapa banyak buku yang di distribusikan atau seberapa banyak perpustakaan yang dibangun. Namun juga bagaimana kita bisa mendorong secara langsung kepada peserta didik untuk membaca dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan tersebut.

Hal ini yang saya belum belum melihat secara konkret pada aspek budaya dari yang telah dipaparkan. Jadi saya ingin dalam hal ini karena di sini ada Mas Nino dari Kemendikbud dan semuanya, mengusulkan untuk pembiasaan membaca pada peserta didik harus dimasukkan ke dalam kurikulum.

Saya melihat kalau di Bengkulu ada satu sekolah *boarding school* di mana pada pukul 7 semua harus sudah berada di satu halaman dan setengah jam mereka harus sudah memulai dengan membaca buku pelajaran, tapi ini hanya di Boarding School di Kabupaten Kaur nan jauh di sana, tapi kalau di secara umum di SMP Negeri/SD Negeri itu tidak dilakukan, mungkin pembiasaan membaca itulah yang perlu.

}

Nah, kebiasaan membaca menjadikan membaca itu bagian dari hidup menjadikan budaya, seperti kalau kita *nggak* makan kita merasa susah. *Nah* ini kita kan juga harus membuat supaya kalau tidak baca itu *nggak* baca buku berarti kita jadi susah.

Nah, ini harus dibuat bisa menjadikan satu kebiasaan dan mungkin ini perlu diawali dari pendidikan usia dini dengan melakukan pembelajaran pada guru-guru PAUD-nya. Yaitu membaca nyaring, sehingga kalau gurunya sudah beri intonasi dengan baik menceritakan satu cerita dengan baik, nanti murid-murid akan terangsang untuk membaca sendiri, wah ini kayaknya menarik juga nih gitu. *Nah* ini jadi program membaca nyaring ini perlu dilakukan secara masif dan terutama di PAUD.

Saudaraku yang berbahagia, saya juga mendukung penuh adanya trigatra bangun bahasa ini luar biasa kalau saudaraku belum tahu trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, Ketua belum tahu kan ada gayanya loh gini, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

Terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Nah, ini abis bimtek sama Prof Endang kayanya nih, jadinya anu ngapalin gerakan-gerakan juga.

Lanjut, siapa dulu nih? Ya silakan, ini minta ini dulu ni Bu Hesti.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Bisri Romly dari Partai PKB Dapil Jawa Tengah X Pak, Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Yang pertama terima kasih atas kehadiran semua K/L kecuali Bappenas sama Menteri Keuangan yang mestinya harus hari ini kan ada yang menentukan gitu, tentang ruang itu kan ruang dan perencanaan itu kan mudah-mudahan ke depan bisa bisa hadir.

Yang pertama, kemarin kita sudah masukkan-masukan dari semua asosiasi yang harus kita sampaikan kepada Bapak. Yaitu yang pertama perlunya koordinasi antar lembaga sehingga ada sinergitas bersama untuk peningkatan literasi. Kalau tadi Pak Sodik mengatakan Iqro memang literasi itu menurut saya sangat penting, karena ada referensi yang cukup berarti atau kalau Gus Baha bilang karena ada *sanad*-nya yang jelas.

Oleh sebab itu, daerah kami Pak, daerah banyak daerah tertinggal yang di kabupaten tidak tertinggal. Oleh sebab itu dengan adanya dasar hukum untuk tenaga perpustakaan dapat menggunakan dana desa sebagaimana dalam Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Prioritas Pengadaan Dana Desa. Ini juga turunannya belum jelas berapa yang harus digunakan untuk desa-desa termasuk desa tertinggal di daerah kabupaten tidak tertinggal.

Yang kedua adanya tadi udah disampaikan dari PAN RB, memang ada formasi khusus ya. Ini juga kejelasannya mohon bisa diatur biar jelas, apakah ikut PPPK, apakah terus ada ASN tersendiri? Sehingga nanti ketika kita ketemu konsituen harus jelas. Barangkali itu aja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut, siakan Pak Aam.

F-P.NASDEM (MOH. HAERUL AMRI, SP.) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang pertama, terima kasih Pimpinan.

Saya mengapresiasi atas rapat ini. Mudah-mudahan rapat hal seperti ini kerjasama seperti ini terus berlangsung, tidak ada ego sektoral atau ego komisi, tapi ini demi sebuah pendidikan bangsa kita. Mudah-mudahan egosentris itu kita lepaskan semua.

Bapak-Bapak semua.

Saya membaca bahwa hasil riset dari UNESCO itu 0,001% tentang minat baca Indonesia. Ini berarti hanya 1000 per satu orang kalau 1001 orang berarti kalau kita kalkulasi berskala dari sekolah rata-rata seratus kalau misalnya, kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 sekolah di desa ya bukan di kota itu 100 sampai 150 orang siswanya berarti satu sekolah itu tidak hanya membaca. Berarti ada sekitar 7 sampai 8 sekolah baru dari baru ada satu orang yang membaca di situ.

Oleh karenanya, mumpung selagi rapat kita bersama kita saling oto kritik terhadap diri kita sebelumnya siapa yang harus melakukan ini sebenarnya.

Yang kedua, kita juga tidak bisa saling mengalahkan antara satu kementerian tapi bagaimana kita bangkit bersama bahwa ketertinggalan ini

harus kita sama-sama garap, agar apa yang menjadi kritik UNESCO ini bisa kita jawab secara bersama-sama dan itu juga menjadi tanggung jawab kita tanggung jawab tentang renteng antara Kementerian terkait dengan komisi X itu yang satu.

Yang kedua, hasil riset dari UNDP juga adalah bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia ini hanya 14,6% jauh di bawah Malaysia yaitu 28% ya. Ini dari UNDP oleh karenanya apa yang menjadi kritik dari UNDP ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama.

Yang ketiga, hasil *assessment* nasional 2021 berada di Indonesia ini ada darurat literasi, satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimal literasi.

Oleh karenanya tadi sudah dikatakan oleh Bang Andreas, kita bicara tentang literasi digital literasi digital, bagaimana kita bisa maksimal bicara tentang persoalan literasi digital kalau sinyalnya aja susah. Kalau kita bicara *nggak* usah jauh-jauh di desa saya. Desa saya ini di Desa Pakis Jaya, Karawang kurang lebih 60 km dari Monas itu sinyal Telkomsel susah banget yang agak bagus Indosat, *nah* ini di Karawang yang istilah kata batuk aja tuh dehem aja terdengar di Monas. Bagaimana kalo dapil yang di yang kita kenal dengan di Kemenkominfo itu ada istilah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Nah itu bagaimana daerah sana? Di desa saya aja yang Jawa Barat 60 km dari Monas itu sinyalnya minta ampun susah, apalagi di Bengkulu itu padahal merah putih itu diciptakan dari Bengkulu sana.

Oleh karenanya, apa yang menjadi kritik dari tiga lembaga besar ini dari UNESCO/UNDP dan hasil-hasil *assessment* ini harus kita jawab sama-sama.

Yang selanjutnya.

Bapak-Ibu sekalian.

Tadi di PKN dikatakan bahwa tingkat apa, PPPK ini sangat rendah sekali oleh karenanya saya lagi, saya kira ini juga harus ada literasi bukan hanya untuk anak didik, tapi juga untuk para guru. Karena kita rasakan saat ini guru-guru kita khususnya di pedesaan, mereka baca itu hanya buku bacaan mata pelajaran yang menjadi tugas pokok mereka. Tidak ada tambahan bacaan yang lain yang itu bisa mengisi wawasan sebagai wacana kedewasaan mereka mengajar di masing-masing desanya. Padahal rata-rata kita ketahui bahwa guru di desa itu, mereka mengajar itu tidak hanya di satu sekolah itu bisa sampai 2-3 sekolah satu itu.

Yang Kedua, kadang-kadang mereka mengajar juga bukan hanya satu mata pelajaran itu bisa 2-3 pelajaran karena apa? Karena di satu sekolah kita tahu sendiri itu gurunya hanya ada misalnya 3-4 orang. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan hanya diisi oleh tiga orang dengan begitu banyak mata pelajaran. Oleh karenanya juga yang harus kita perhatikan adalah literasi digital bukan hanya untuk para siswa tapi juga para guru-guru di daerah, saya kira itu.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Mustafa Kamal, silakan.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan yang saya hormati,
Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati dari kementerian/lembaga yang hadir
Anggota Dewan yang saya hormati,

Kita ini seperti terkepung begitu ya, untuk meningkatkan literasi dari jalur yang tradisional sudah *nggak* kekejar, pada saat yang bersamaan itu ketiban dengan kemajuan IT semua serba terdigitalisasi.

Jadi sementara kita belum mencapai satu standar literasi yang wajar katakanlah, tidak harus maju lah. Ya kita sudah harus mengejar lagi kemajuan IT ini, sehingga ini perlu satu terobosan menurut saya dan saya berharap kepada Kementerian Koordinator Kesra bisa merajut apa yang kita bahas pada hari ini begitu.

Ini kan itung-itung meskipun dari anggarannya kecil ya Bu ya, ini kita bantu nih Kemenko Kesra untuk rapat koordinasi di DPR di Komisi X. Jadi Komisi X memberikan fasilitasnya karena kita melihat *urgency* yang begitu penting.

Tadi sudah saya sudah senang tuh sudah ada bagan yang Ibu buat mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga jadi kunci koordinasi ya di Kementerian koordinator, karena yang lain akan memang fokus pada pada bidang tugasnya.

Dan mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya harus sampaikan ego sektoral itu sampai hari ini memang tidak selesai ini kita ini. Meskipun kita sudah ikut berkali-kali angkatan pelatihan-pelatihan di apa kepemimpinan nasional untuk menghilangkan ego sektoral, itu kenyataannya tidak bisa diselesaikan sampai hari ini, ya saya harus sampaikan meskipun ini ini pahit ya.

Tapi kalau kemudian ini bisa ditemukan kata kuncinya semuanya fokus ke sana anggaran bisa dilakukan efisiensi, ya kita memang harus berani ambil keputusan. Tadi dari Kementerian PAN RB menyampaikan kalau digitalisasi

berarti ada efisiensi ini profesi Pustakawan ini jadi disruptif juga nih. Apakah nanti dengan mesin bisa digantikan semua proses-proses yang ditangani oleh manusia secara manual? Ini juga memang kita harus harus berani harus berani mengambil keputusan.

Meskipun ya, para Pustakawan yang kemarin hadir di sini semuanya menyampaikan aspirasinya tapi ini sebuah kenyataan bukan hanya Pustakawan. Saya juga dulu bergelut di dunia media sebagai redaktur di jurnal di majalah, terdistribusi lebih awal. Ya sekarang semua serba digital, jadi sekarang memang kita harus dari Kominfo ini perlu memberikan wawasan yang terbuka yang jujur apa adanya begitu.

Jadi meskipun ini mungkin akan tanda kutip “menyakitkan” gitu dan terpaksa meninggalkan gitu, tapi ini harus diungkapkan diungkapkan. Masa depan ini untuk mengejar ilustrasi, ini gimana kita kalau pakai urut kacang yang secara tradisional. Bagaimana literasi ditingkatkan ini kita sudah *nggak* ngejar ditiban terus setiap saat oleh kemajuan teknologi informasi yang luar biasa dengan apa Chat GPT itu sekarang itu. Jadi kita susah mengukur literasi anak didik ini kita ini serius jujur apa tidak ini kan sangat apa ya, sangat sulit diukur.

Sehingga kita tidak perlu melakukan abjadiah yang tradisional dan dengan anggaran yang tidak efisien, kita fokus. Saya pengin kita jujur terbuka di sini bagaimana terobosan bersama yang bisa kita sepakati dan saya juga berharap Komisi X melalui Panjanya, bisa bisa melahirkan rekomendasi yang kuat ke arah sana. Karena kita memang sedih ya harus meninggalkan yang tertinggal tapi kalau kita urut kacang satu-satu dalam prosesnya, ya tempat lain sudah tidak memakainya lagi untuk apa juga kita ini dengan sangat terpaksa kita harus berani.

Saya juga kadang-kadang berpikir kita cetak-cetak buku terus sebar-sebar sampai sekarang cetak cetak *nggak* pernah cukup sebar-sebab tidak pernah sampai. Sampai kapan kita mau sampai pula anggarannya dibawa entah ke mana. Ini apa ini, apakah kemudian investasinya kita alihkan untuk memperkuat apa sinyalnya itu tadi BTS-BTS itu yang kuat. Lalu kemudian kita berikan handphone atau apa namanya Tab pada setiap anak dengan mungkin itu lebih jelas hasilnya.

Anak-anak toh juga sudah jadi netizen kalau kita kan belum ya Pak ya? Kita ini mau masuk juga *enggak* diterima juga udah udah susah gitu berinter kalau mereka dari lahir sudah warga sudah netizen mereka hidup di situ. Kalau kita kemudian kasih buku-buku terus kita cetak menyebarnya juga *nggak* nyampe-nyampe ini, mohon maaf saya bicara apa adanya nih.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Panja ini harus berani melihat kenyataan yang sedang berjalan untuk kemudian kita mencari terobosan kita tidak urut kacang lagi jadi abjadiah yang tradisional, kita langsung mengejar di titik yang sekarang orang berkompetisi di seluruh dunia.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam warahmatullahi wabaraktuh.

Bu Illiza, silakan.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Juga pada Allah dan selalu pada rasulullah.

Yang saya muliakan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X.

Dari seluruh narasumber hari ini pemateri dari lintas Kementerian yang mungkin *nggak* hadir dari Kemenkeu ya, Kemenkeu jarang hadir ya Pak Fikri? *Nggak* boleh hadir iya padahal ini kan bicara untuk kemaslahatan bangsa itu ya.

Tentu kami mengapresiasi paparan yang telah disampaikan dari lintas Kementerian dan lembaga yang hadir pada hari ini, yang sebetulnya hampir seluruhnya punya program, tapi mungkin *nggak* bisa fokus gitu ya, bagaimana meningkatkan literasi di Indonesia. Karena ketika kita melihat hasil survei ternyata Indonesia minat bacanya posisi ke 60 dari 63 negara. Ya artinya ini memang menjadi peringatan keras bahwasannya Indonesia saat ini dalam kondisi darurat literasi.

Ketika ini menjadi darurat literasi harus ada *political will* yang kuat yang ditentukan oleh penentu kebijakan yaitu Presiden, untuk apa? Untuk bagaimana menangani persoalan ini karena yang ingin dicapai adalah SDM unggul.

Ketika kita bicara SDM unggul tentu basisnya adalah literasi, kita bicara kemiskinan karena orang yang bodoh juga sangat dekat dengan kemiskinan, apalagi kemiskinan yang *nggak* akan bisa berubah itu karena kebodohan ditambah kemalasan biasanya kan udah bodoh pasti malas begitu.

Nah, ini ada dari Kemenko PMK sebagai yang yang mengkoordinasikan lintas kementerian dan lembaga yang harusnya bukan hanya bicara dana 500 juta. 500 juta kan *nggak* ada apa-apanya Bu untuk Indonesia, bukan hanya sekedar ada program literasi di Pemko PMK, tapi bagaimana melakukan koordinasi. Jadi koordinasi lintas ini sehingga ada fokus kerja siapa yang melakukan apa dan bagaimana melakukannya itu yang harus benar-benar dikoordinasikan.

Kita ini kan kebiasaan sekedar sekedar, hidup sekedar sekedar, program sekedar ada. Kita lihat dari Kementerian Pendidikan misalnya katakanlah dari apa yang dipresentasikan tadi oleh Pak Nino dan dari, apa itu, memang betul ada buku-buku yang udah mulai lebih bagus gitu, ada sekolah yang sudah mulai mungkin melakukan perubahan tapi berapa persen.

Coba Bapak pergi ke sekolah-sekolah di daerah-daerah, itu hanya sekedar untuk persyaratan saja ada perpustakaan, perpustakaannya tidak menarik, buku yang ada itu diletakkan sudah berdebu, bahkan mungkin jarang ada yang masuk. Kemudian buku bacaannya juga tidak menarik, 15 juta itu berapa sekolah sih yang bisa terdistribusi, tingkatannya di tingkatan apa saja? Maka ini kan bicara sekedar kalau kita bicara hari ini Perpustakaan Nasional ternyata ketika Kemendikbud melakukan pembuatan kajian akademik terhadap Peta Jalan Pemberdayaan Literasi Nasional, ini juga dari Perpustakaan Nasional *nggak* dilibatkan yang hanya dilibatkan Pemkosetkab, Kemendagri, Kemenag, Dikbud Ristek, Daerah, tapi Perpustakaan Nasional *nggak* terlibat. Rakernas yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang saya hadirin waktu itu itu dari Kemendikbudristek, eh salonnya yang paling bawah ini kita bicara *political will* dulu, komitmen dulu, kalau ada kemauan ada jalan.

Makanya posisinya dari survei tahun ke tahun, walaupun ada indeks yang meningkat kecil sekali, kecil sekali. Mungkin karena ngurus ini *nggak* banyak duitnya, tapi ngurus ini ibadah. Orang paham yang disebut ulama orang berilmu, karena itu ilmu. Mau senang di dunia paling, jadi kalau *nggak* ada ilmu mau gimana? Ini persoalannya ini persoalan bangsa, jangan dipandang setengah mata sebelah mata. Ya mungkin Kemenkeu *nggak* mau hadir karena dianggap ini *nggak* penting lihat aja Perpustakaan Nasional anggarannya *nggak* akan pernah meningkat dari 700-800 miliar sampai 1 triliun lebih, *nggak* pernah. Tapi kerjanya luar biasa, karena *iqro bismi rabbikalladzi khalaq perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

Ini kan persoalan, kemarin dalam paparan yang disampaikan oleh para asosiasi-asosiasi literasi itu, mereka juga merasa *nggak* diperhatikan. Itu tadi bicara tentang Merdeka Belajar, ternyata dari perpustakaan sekolah madrasah dan sebagainya juga mereka merasa juga *nggak* dilibatkan. Dari paparan yang mereka sampaikan ada beberapa sumber juga, mereka ingin agar jika pendidikan ada di istilah sebagai guru penggerak dalam kurikulum, Pustakawan pun perlu dilibatkan dalam elemen Kurikulum Merdeka, ternyata Pustakawan juga *nggak* dilibatkan.

Kita kan *nggak* sekedar memenuhi apa yang kita mau gitu, caranya itu harus benar-benar ma'ruf niatnya harus benar tulus gitu, sehingga semua komponen merasa dilibatkan dan semua orang pasti punya masukan. Masukan yang diberikan kemarin pustakawan Indonesia itu jumlahnya jomplang sekali di Pulau Jawa antara pulau-pulau Sumatera. Kalau Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah itu yang paling tinggi kemudian Jawa Timur kemudian Jawa Barat, selebihnya hanya seratusan ratusan Aceh 290-an Pustakawan yang ada, *nggak* cukup Pak.

Tadi katanya formasi *nggak* terisi, ya jelas *nggak* terisi, peminatnya juga kurang. Karena kalau mereka mau sekolah tinggi di mana mau ditempatkan? Kalau di Amerika itu kalau kita bandingkan misalnya ya, Amerika itu apa Pustakawan itu benar-benar pegang peranan penting. Jadi mereka mendapat pengakuan layak pekerjaan mereka, itu harus mendapatkan gelar master dalam perpustakaan dan itu programnya diakreditasi oleh *American Library Association*, gaji mereka terima cukup kompetitif dan mereka juga mendapatkan berbagai manfaat seperti asuransi kesehatan, pensiun. Pustakawan di Amerika Serikat itu memiliki peluang luas untuk mengembangkan karir dan melakukan inovasi di bidang mereka, itu Amerika.

Di Kanada persyaratan untuk menjadi Pustakawan mirip dengan di Amerika perlu memiliki gelar MLIS dan juga mereka perlu anggota dari asosiasi perpustakaan provinsi dan nasional, gaji dan manfaat yang mereka dapat juga cukup kompetitif, sumber daya dan peluang pengembangan secara profesional inovatif dan terbuka luas di Kanada.

Kemudian, di Jerman berbagai jalur bisa diambil untuk menjadi Pustakawan termasuk pendidikan formal universitas pelatihan vokasional. Pustakawan di Jerman mendapatkan gaji yang baik dan juga mendapatkan manfaat seperti asuransi kesehatan, pensiun, mengembangkan karir itu.

Di Australia juga begitu mereka perlu menjadi anggota *Australian Library and Information Association* atau ALIA, jadi gaji mereka semuanya kompetitif. Ini tadi kan tadi dipaparkan perlu ada peningkatan kelas jabatan dan itu harus ditentukan oleh Perpustakaan Nasional. Sejauh mana Perpustakaan Nasional punya kemampuan untuk itu? Ini Kementerian juga harus koordinasi juga ini dengan Perpustakaan Nasional kalau untuk bisa meningkatkan level. Itu makanya apa namanya, persoalannya sangat *crowded* kita meleraikan benang kusut ini harus pelan-pelan dan harus tersistematis.

Jadi, kalau peta literasi dan sebagainya ini tidak melibatkan multi pihak secara menyeluruh, saya juga agak pesimis gitu untuk itu, tapi kita *nggak* boleh pesimis dalam hidup harus selalu positif dan optimis. Maka, Panja ini dilakukan adalah untuk bagaimana menggerakkan, mendorong agar Indonesia emas generasi emas 2045 itu bisa kita wujudkan di Indonesia tercinta ini.

Jadi itu maka kami juga berharap agar bagaimana peningkatan kualitas dari jumlah Pustakawan itu benar-benar bisa punya *political will* dari lintas Kementerian terkait, terutama PMK yang akan menekan akan mem-*pressure* gitu ya, seluruh kementerian yang ada gitu ya dan kemudian juga status gaji dari Pustakawan juga benar-benar harus diperhatikan untuk dilakukan peningkatan. Kemudian juga peningkatan pustakawan itu pendidikannya karena kan era digital perubahannya cepat sekali. Jadi mereka benar-benar harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

Jadi mudah-mudahan kami menyampaikan apa yang ada *Qulil Haqqa Walau Kana Murrn* katakan yang benar walaupun itu pahit, tapi mudah-mudahan kebenaran itu *insyaallah* akan memberikan dampak yang benar-benar positif untuk kemaslahatan Indonesia yang kita cintai ini.

Terima kasih atas perhatian mohon maaf atas kekurangan.

*Wal afwu minkum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Cukup ya bu illiza

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Ini nampaknya mestinya mungkin banyak yang akan direspon hanya ini kesepakatan, apa perlu dijawab satu-satu atau mungkin ditulis saja. Jadi mohon untuk menyampaikan, apa responnya ini semuanya secara tertulis, kami juga nampaknya mungkin tidak bisa selesai nih. Apa namanya masa sidang ini karena masih ada tadi kementerian yang tidak, mungkin ada yang menghambat tidak datang ke sini.

Tapi, kita butuh informasi tentang mungkin atau struktur anggaran dan seterusnya termasuk juga perencanaan. Karena sesungguhnya ada beberapa kali pernah juga hadir ke sini dan ada sinkronisasi. Termasuk kemarin ketika mengurai PPPK itu juga ketika dihadirkan ke sini bisa, ada misalnya pertama yang mendaftar cuma sedikit, kemudian naik menjadi tinggi, kemudian juga realisasinya juga semakin, semakin memenuhi harapan meskipun tidak semuanya bisa memenuhi harapan.

Bapak-Ibu, saya kira itu kesepakatannya dan saya tidak perlu menambah ini, saya sebelum membaca ini memang nampaknya. Ini saya memanfaatkan waktu sedikit karena dari beberapa hal narasumber yang datang ini memang kita kembali harus ke pondasi dasar negara. Misalnya ke Pancasila Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 misalnya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu anggaran konstitusi.

Kemudian kalau kita hanya diskusi begini kadang-kadang kita harus kembali ke norma, misalnya keyakinan kepada agama. Apakah karena agama apa saja itu ternyata kalau diskusi tentang membaca, itu sesuatu yang mulia kalau tadi berulang-ulang dalam Islam saja misalnya Iqro itu apa namanya ayat pertama yang turun gitu.

Tapi kalau lebih ini lagi, jadi kalau *nggak* ada semangat bahwa ini kita sedang diskusi bukan hanya masalah urusan apa pekerjaan, atau karena kementerian mengutus saya ke komisi X hanya itu saja tampaknya menjadi hampa dan norma tanpa nilai gitu.

Tapi, kalau kepada kembali ke Tuhanan yang maha esa meskipun kayaknya normatif begitu, agama apapun ternyata mengajari bagaimana supaya umatnya itu apa namanya, berilmu kemudian banyak membaca dan sebagainya.

Sebut saja misalnya, kalau misalnya tidak hanya dari *iqro* kalau kita sudah sepakat misalnya literasi, literasi itu yang akan kita garap apa? Pertama harus tahu bahwa ini adalah tugas dari yang menciptakan, tidak hanya konstitusi. Kalau bahasa Islam misalnya, dia yang memerintahkan atau dia yang membangkitkan. Berarti dari Tuhan bukan hanya urusan kita ini urusan, jadi kita sedang diskusi itu merasa bahwa kita sedang diperhatikan, fiilu miihina. Itu kita sepakat dulu kalau kalau di dalam Islam itu berarti yang literasinya nol itu seperti orang yang masih kosong seperti baru lahir dari ibunya.

Kalau dari lahir sampai tua begitu terus berarti ini Bapak-bapak *nggak* punya makna apa-apa. Kalau teori Tabula Rasa berarti dia masih kosong atau kalau orang misalnya kembali ke teorinya Ki Hajar Dewantoro, berarti dididik itu supaya tidak tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang masih bahasa Jawanya *mbok-mbokan* itu namanya umiyin, orang yang masih ikut ke uminya terus, ke ibunya terus.

Jadi orang yang apa namanya dependent, orang yang dipenden berarti kan yang akan kita ubah adalah orang yang dari dependent menjadi independent gimana caranya. Nah begitu berarti proses literasi adalah proses mengubah dari umiyyin kepada yang terdidik dengan baik. *Nah* terdidik dengan baik itu apa? Jadi kita harus mendefinisikan dulu yang akan kita ubah itu apa? Karena kalau hanya baca buku misalnya kasihan juga yang ini apa yang buta, buta matanya, karena ternyata tidak ada cerita pakai huruf braille juga *nggak*.

Atau sangat sedikit berarti sumbernya bukan hanya dari dari buku ada mungkin dari suara. Suara itu cerita-cerita yang di di duplikasi dengan suara apakah sudah ada kita perhatian apa *nggak* juga. Artinya yang akan kita ubah itu pertama di definisikan dulu itu, *raw input*-nya itu apa kemudian nanti kita proses. Kalau kembali lagi kepada norma agama itu kan bahasa, dan ini Bapak-bapak ini kan jadi Rasul menjadi rasul, ini siapa saja ini. Jadi Kemendikbudristek atau Perpustakaan kah atau bareng-bareng *nggak* apa-apa tapi dikoordinatornya yang tanggung jawab siapa, jadi rasulnya siapa nih, institusi.

Jadi pertama, kondisi yang kita harapkan ini berubah menjadi apa, itu kita definisikan dulu. Nampaknya jangan-jangan butuh undang-undang ini, Undang-Undang Tentang Literasi, tidak hanya Undang-Undang Perpustakaan, tapi Undang-Undang Tentang Literasi. Makanya, ini nampaknya mungkin agak panjang, *nggak* bisa disamping ada kementerian yang apa yang belum hadir ya.

Kalau kembali ke norma tadi, itu membaca misalnya ini, kita hanya membaca tok terminologinya hanya membaca. Kalau tadi Pak Sodik bilang kenapa ada literasi Quran lebih tinggi daripada literasi membaca kita. Lah kalau Quran jelas, karena yang pertama *yatlu 'alaihimi ayatihi*, membaca itu istilahnya tilawah, tilawah itu ada pembaca *bi qiroatiji, bi hifdzihi, wa bifahmihi bi tatqibiji*. Empat itu pertama, membaca membaca teks, kemudian *hifdzihi* menghafal, jadi mengulang-ulang repetasi itu juga. Jadi bahkan ada orang yang sama sekali *nggak* pernah lihat tapi dia hafal.

Kemudian *bi fahmihi*, berarti memahami. Berarti sampai *how to understand*, sampai memahami. Jadi, orang membaca *nggak* mesti paham, orang menghafal tidak mesti paham, tapi ada langkah selanjutnya, yaitu *bi fahmihi*. Baru kemudian *bi tatqibih*, bagaimana memproduksi, melaksanakan, dan seterusnya.

Ini jelas definisi itu jelas, sehingga ya sudah jelas, makanya banyak orang yang sampai orang yang otaknya hanya separo tok, *nggak* bisa apa-apa, tapi dia hafal halaman berapa ini itu, bisa gitu. Karena, jelas Pak, ini kita *nggak* jelas, sehingga dinilai rendah oleh PISA ya. Cuma marah-marah aja atau kita *nggak* usah pakai itu PISA udah gitu tok apa itu selesai.

Saya kira tidak bisa kita perlu mendefinisikan dulu kondisi *raw input* yang anu itu apa yang akan kita ubah. Kemudian prosesnya bahkan kalau para Ustaz itu kan tadi dari surat Al-Jumu'ah itu kan *yatlū 'alaihīm āyātihī wa yuzakkīhim wa yu'allimuhumul-kitāba wal-ḥikmata*. Ada tiga dan luar biasa. Jadi nampaknya, kita terlalu jauh dari norma, karena kita ini ke Tuhanan yang maha esa itu hanya di hafal tok itu, *ndak* pernah dia rasakan kalau ke Tuhanan yang maha esa. Betul kita diskusi literasi itu sama saja dengan kita diperhatikan ini jangan-jangan banyak malaikat yang ada di sini, kita ini main-main. Jangan-jangan itu hanya karena ada anggarannya jadi jalan, itu *nggak* ada anggarannya jadi *nggak* jalan begitu.

Jadi, kalau kita betul-betul dari apa beri pemahaman keyakinan kita, ini kita sedang mendiskusikan tentang eksistensi negara kita mendiskusikan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya gitu kalo *nggak* ada kita hanya marah-marah saja atau mungkin *nggak* usah pakai PISA, *nggak* usah pakai ini tapi apa namanya? Ya itu selamanya kita *nggak* punya norma, kita *nggak* punya standar dan seterusnya.

Nah, itu saya kira. Mungkin sebagai tambahan untuk memberikan isi para ahli atau memaknai lebih ini lagi, supaya nanti selanjutnya, karena banyak putus asa tadi mengikuti kata Mustafa Kamal ngikutin yang tradisional *nggak* nyampe gitu, tapi yang modern juga kita ketinggalan. Jadi terus apa yang tradisional juga *nggak* nyampe yang modern apalagi. Pak Andreas bilang separuh kita ini dunia nyata separuh kita di dunia maya.

Iya 6,13 kata Bu Moli masih *blank spot* 8% lebih masih *nggak* ada internet katanya, nah itu katanya. Lah terus gimana Bengkulu *nggak* bisa ini, jadi jadi orang-orang bagi-bagi laptop segala macam, bagi-bagi pulsa kata Bu Dewi Coryati ohh *nggak* relevan buat saya, kalo mau dibagi silakan kalau di tempat saya *nggak* dibagi juga *nggak* papa karena *nggak* ada sinyal *nggak* ada apa-apa.

Baik, saya kira saya minta waktu sedikit saja untuk membaca, tidak seluruhnya yang B saja ya, terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber Panja Peningkatan Literasi Dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI diantaranya sebagai berikut:

Satu mendesak BSKAP dan BPP bahasa Kemendikbudristek RI berkoordinasi berkoordinasi apa ini, dengan Perpustakaan RI dan kementerian/lembaga lain pengampu program literasi untuk menyusun atau menyepakati satu indeks literasi Indonesia yang dapat mengukur semua aspek literasi dan kinerja pemerintah. Ini bahasanya karena banyak sekali jadi menjadi global begini.

Yang kedua, mendorong BSKAP menyampaikan peta capaian literasi di daerah berdasarkan data rapor Pendidikan, termasuk data perbandingan penggunaan kurikulum yang berbeda sesuai bahan pengawasan Komisi X DPR RI terhadap implementasi program literasi kementerian.

Yang ketiga, jika sepakat bahwa tenaga perpustakaan merupakan bagian penting dalam peningkatan literasi masyarakat maka pemerintah perlu merumuskan pola rekrutmen tenaga perpustakaan ataupun pola penugasannya dengan tidak mengurangi kualitas SDM perpustakaan di perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah diantaranya memperbaiki kelas jabatan fungsional tenaga perpustakaan.

Ini kesepakatan juga beberapa Kementerian perlu diundang lagi.

Saya kira di ini ya di sini beberapa, terus tadi saran-saran ada beberapa, tadi ada Kementerian Kemendes PDTT, ada Dirjen PDT ya Pak ya? Itu yang lebih ini karena ini kan Daerah Tertinggal itu yang desa pedesaan.

Iya yang tidak tertinggal itu kan ada desa-desa semua desa.

Kenapa ada yang ketinggalan juga, jadi kementerian yang belum hadir untuk diundang kembali. Kemudian tadi ada beberapa saran termasuk juga di luar forum tadi ada juga dari anggota menyampaikan dari Kemendikbudristek ada. Karena esensi dari literasi itu ternyata menurut kajian temen-temen itu atau diskusi temen-temen ada adalah di pendidikan. Jadi karena pendidikan maka *core*-nya mestinya pendidikan, *nah* oleh karenanya kemudian Dirjen Paud Dasmen kemudian Dirjen GTK, Dirjen Dikti ini nampaknya perlu diundang.

Kemudian, Kemendagri tadi di samping Bangda ada apa istilahnya Bu? BAK Dirjen Bina Keuangan Daerah, *nggak* ada administrasinya ya Bu.

Dirjen Bina Keuangan Daerah administrasi. Jadi, Bina Administrasi Keuangan Daerah BAKD, Bina Administrasi Keuangan Daerah, begitu ya. Ingat saya begitu. Mantan bagian dari pemerintahan daerah jadinya. BAKD (Bina Administrasi Keuangan Daerah). Oh ya, Kemenaker juga betul, karena tadi apa namanya? Karena ini jadi termasuk diundang lagi jadi Kemenaker, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas itu yang belum ada, ya Kemenag juga karena ada madrasah. Kemarin juga Asosiasi Perpustakaan juga, ternyata sekolah dan madrasah sekolah dan madrasah asosiasi perpustakaan, pengelola perpustakaan sekolah dan madrasah begitu ya? Udah cukup?

}

Saya kira demikian Bapak-Ibu. Mungkin, jawaban tertulis akan disampaikan berapa hari ini? Sebelum sebelum tanggal 14 penutupan, penutupan masa sidang tanggal 14. Jadi, sebelum tanggal 14, tanggal 13 berarti, tanggal 12 Bapak-Ibu yang perlu direspon dari apa sesuai dengan penangkapan Bapak-Ibu tadi catatan-catatan.

Sekali lagi bukan untuk apa-apa, bukan untuk penilaian, bukan apa-apa, tapi untuk supaya bagaimana literasi ini bisa naik. Karena ini problematika yang terus berulang dari periode ke periode dari tahun ke tahun, ini mudah-mudahan dari sini SDM dari sisi atas aja lah begitu.

Jadi, tanggal 12 ya, ada Dirjen yang belum atau ada jelas, ada programnya literasi, tapi kemudian belum terundang ke sini.

Kalo Kemendikbudristek, saya kira saya termasuk jenis orang yang punya anak yang kemudian pada waktu kecil kira-kira nanti akan bermasalah. Sehingga, saya mempraktekkan, misalnya teorinya Glenn Doman misalnya. *Nah*, ini kenapa *nggak* banyak diskusi tentang PAUD itu sangat ini. Jadi keranjingan anak itu bisa keranjingan membaca kalau sebelum usia 5 tahun, itu sudah dibiasakan membaca tapi satu-satu yang *nggak* boleh dilakukan adalah tes.

Padahal Pak Guru itu coba *mic* aja tes tes saking hobinya ngetes bedanya bedanya dengan bankir itu cek cek begitu kan, karena dia suka ngurusin cek, tapi kalau Pak Guru itu selalu ngetes terus sehingga sampai apa namanya ketika megang *microphone test test*. Padahal menurut Glenn Doman bahwa ketika seseorang membuat ujian atau tes pokok, berapa juta sel otak itu hancur.

Karena ini, *nah* sehingga, kalau dan saya mempraktekkan anak saya ada yang karena *nggak* bisa jalan dan dipraktekkan ternyata bisa jalan. Jadi, kekurangan-kekurangan sel otak itu karena penelitiannya kan beliau Glenn Doman, anak yang punya apa punya fungsi otak hanya separo. Punya fungsi otak cuma separuh dan ternyata bisa, pada usia 5 tahun dia bisa jalan, tidak tidak menjadi disabilitas, menjadi orang umum seperti biasa.

Saya kira demikian, mungkin mewakili diantara Bapak-Ibu satu atau dua patah kata mewakili yang hadir.

Silakan, mungkin yang di tengah Prof. Endang atau Mas Nino silakan.

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA:

Baik, terima kasih.

Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati dan juga,
Para Wakil Pemerintah dari kementerian lembaga yang hadir pada kesempatan ini,

}

Saya atas nama pemerintah, hari ini menyampaikan terima kasih atas sejumlah masukan pandangan-pandangan yang tadi disampaikan melalui forum dan apa yang menjadi perhatian dari Bapak-Ibu semua itu. Tentu akan menjadi catatan bagi kami untuk meningkatkan apa kualitas koordinasi dan kualitas program yang apa kami kerjakan. Karena program literasi adalah program bersama yang tentu harus dikerjakan secara bersama-sama.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucap, “*alhamdulillahirobbilamin*”, maka sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan seterusnya.

Kemudian, mohon maaf kalau mungkin di tengah dengan kesibukan Bapak-Ibu terpaksa harus hadir di Komisi X.

Sekali lagi dengan mengucapkan, “*alhamdulillah*” maka RDP hari ini dinyatakan ditutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.23 WIB)

(KETUK PALU 3 KALI)

a.n. **KETUA RAPAT**
SEKRETARIS RAPAT

TTD

DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003